



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN

LKPJ

DINAS KESEHATAN KABUPATEN DHARMASRAYA

2025

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Wasyukurillah, Puji dan Syukur ke Hadirat Allah SWT, akhirnya Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2024 Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya telah dapat diselesaikan. LKPJ sangat diperlukan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Yang menyebutkan bahwa LKPJ disampaikan oleh kepala daerah dalam rapat paripurna dewan perwakilan rakyat daerah yang dilakukan 1 kali dalam 1 tahun anggaran berakhir.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka masing-masing Perangkat Daerah juga berkewajiban menyampaikan laporan sebagai bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati tersebut, untuk itu Dinas Kesehatan menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) sesuai dengan pelaksanaan program kerja dan kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2024 secara transparan, akuntabilitas, akurasi dan obyektif dan menyampaikan keberhasilan yang dicapai maupun masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut.

Demikian laporan ini dibuat untuk dapat dipergunakan Terima kasih.

Pulau Punjung, Januari 2025

PI, Kepala Dinas Kesehatan,



H. Yosta Defina, S.Farm, Apt, M.KM

19690810 199102 2 001

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) merupakan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, LKPJ sangat diperlukan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pada Peraturan tersebut menyatakan bahwa, LKPJ adalah laporan yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada dewan perwakilan rakyat daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut laporan pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.

LKPJ Dinas Kesehatan merupakan ringkasan dari proses penyelenggaraan program kerja Dinas Kesehatan yang termuat dalam Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Perangkat Daerah kepada DPRD dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Dharmasraya dan mengacu kepada Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Dharmasraya.

1.2 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 3 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas Kesehatan Tahun 2023 Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud :

Memberikan informasi tentang penyelenggaraan pemerintah Daerah khususnya Dinas Kesehatan selama satu tahun anggaran sudah berjalan yang dilaporkan kepada DPRD.

Tujuan :

1. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang penggunaan anggaran dan pencapaian program-program kesehatan.
2. Meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan Dinas Kesehatan
3. Memberikan rekomendasi untuk perbaikan penyelenggaraan Dinas Kesehatan ke depan.

1.4 Ruang Lingkup

Dinas Kesehatan merupakan urusan pemerintah yang berkaitan dengan pelayanan dasar dalam urusan kesehatan, kegiatannya dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan UPT Dinas Kesehatan. Laporan LKPJ tahun 2024 berdasarkan DPA Dinas Kesehatan tahun 2024 yang menggambarkan capaian program dan kegiatan serta permasalahan dan upaya penyelesaian setiap urusan kesehatan sesuai dengan kebijakan strategis yang ditetapkan dan tindak lanjut rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun anggaran sebelumnya.

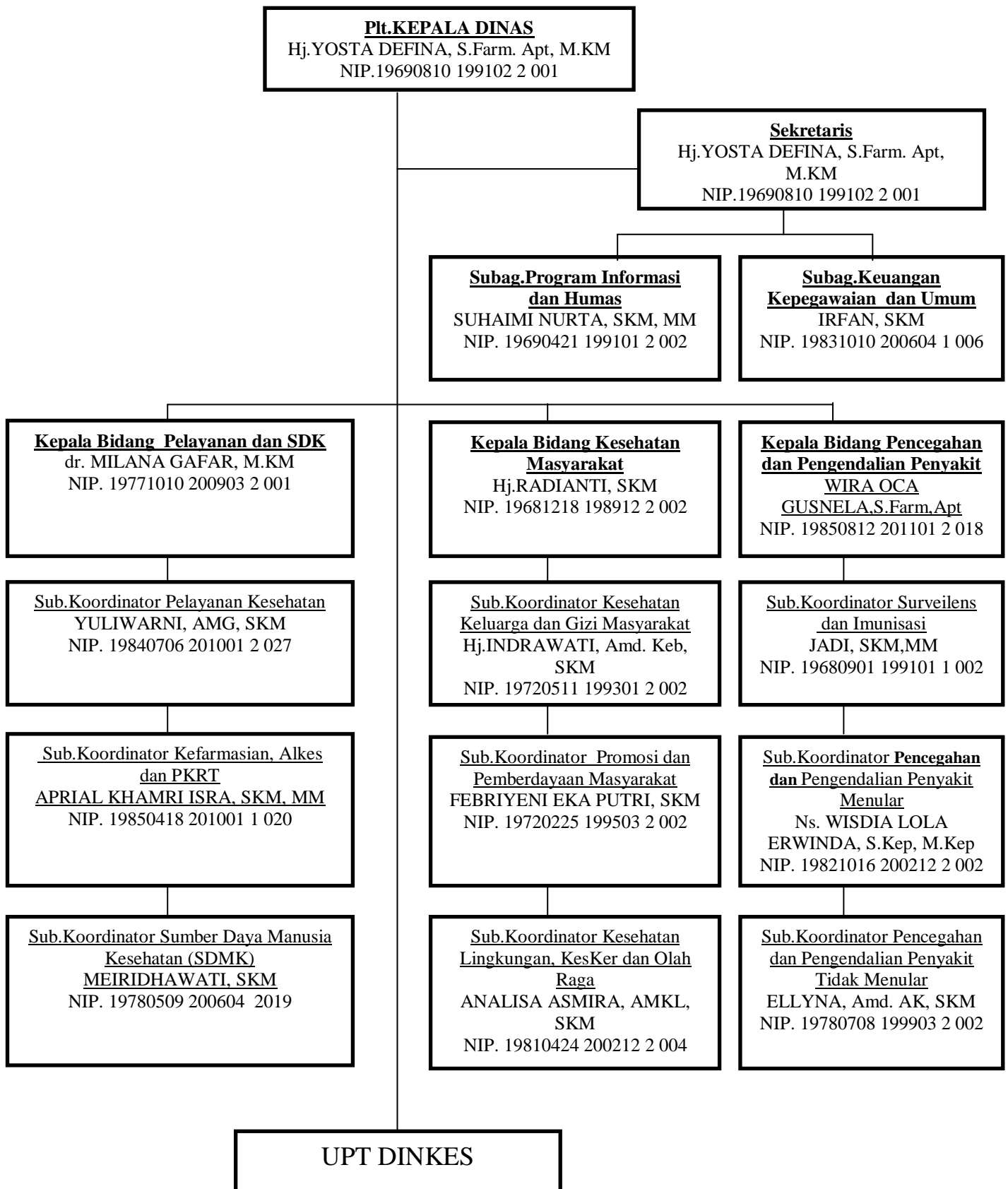
1.5 Visi dan Misi

Urusan pemerintahan terdiri dari Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dibagi menjadi urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah. Sedangkan Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah. Urusan pemerintah wajib yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah terbagi menjadi Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014. Dinas Kesehatan termasuk dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang bertujuan untuk mewujudkan visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dharmasraya yaitu "***Terwujudnya Kabupaten Dharmasraya Maju yang Mandiri dan Berbudaya***" dengan Misi Bupati dan Wakil Bupati, terdapat pada nomor dua tentang kesehatan yaitu "***Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia***" tingkat keberhasilan Dinas Kesehatan dalam menjalankan tugas, pokok dan fungsinya tersebut sangat ditentukan pada tingkat kualitas dan kuantitas terhadap pencapaian kinerja program-program yang ada di Dinas Kesehatan sesuai dengan tujuan Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya "***Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat***" di Kabupaten Dharmasraya hingga tahun 2026.

1.6 Struktur Organisasi Tata Kerja Dinas Kesehatan

Berdasar Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan adalah sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN PER-31 DESEMBER 2024



BAB II

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

URUSAN KESEHATAN

Dinas Kesehatan merupakan urusan pemerintah yang berkaitan dengan pelayanan dasar dalam urusan kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan UPT Dinas Kesehatan. Pelaksanaannya berdasarkan DPA Dinas Kesehatan tahun 2024 yang memiliki 5 (lima) Program, 17 (tujuh belas) Kegiatan dan 63 (enam puluh tiga) Sub Kegiatan. Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 159.103.770.575,00,- dengan realisasi Rp. 152.822.420.638,74,- Atau 96.05% dengan uraian sebagai berikut:

1. Capaian Kinerja Program sesuai dengan Target Kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

Capaian Kinerja Program Urusan Kesehatan Sesuai Dengan Target Kinerja
Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6
	Dinas Kesehatan				
1	Meningkatnya status kesehatan masyarakat	Angka kematian ibu melahirkan (AKI)	183/100.000 kelahiran hidup	(6) 187/100.000 kh	97,8
		Angka Kematian Bayi (AKB)	16/1000 kh	(42) 13/1.000.000 kh	118,7
		Prevalensi Malnutrisi	9 %	5.5 %	138,8
		Persentase Rumah Tangga PHBS	55 %	55,20 %	100
		Meningkatnya Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	75 %	75 %	100
		Persentase Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditangani ≤24 jam	100 %	100 %	100
		Cakupan Pencegahan dan pengendalian penyakit menular	100 %	100 %	100
		Cakupan Penemuan dan Penanganan Penyakit Tidak Menular	100%	99,46	99,46
2.	Meningkatnya mutu dan akses pelayanan kesehatan	Visite Rate	5	5.32	101
		Persentase Puskesmas Terakreditasi Utama	100 %	100 %	100
		Persentase UPT RSUD Terakreditasi	100%	100 %	100
3.	Meningkatnya Kualitas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	BB 78.612	78.98	100,46
		Nilai Indeks Kepuasan	B 81,5	96.68	118,6

2. Capaian Kinerja Program Dan Kegiatan, Dituangkan Sesuai Dokumen Anggaran Tahun 2024 :

No	Program Kegiatan	Kebijakan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA											
1 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											
1)	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Peraturan Bupati Dharmasraya No 24 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Dharmasraya No 8 tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan pemerintah Kabupaten Dharmasraya tahun anggaran 2024	1095 orang	1095 orang	100%	65.379.767.000	64.872.776.348	99,22 %	Masalah Tidak Ada		
2).	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan	Peraturan Bupati Dharmasraya	1 dokumen	1 dokumen	100%	7.326.800	6.209.350	84,75 %	Masalah Tidak Ada		

No	Program Kegiatan	Kebijakan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	No 24 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Dharmasraya No 8 tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan pemerintah Kabupaten Dharmasraya tahun anggaran 2024									
3)	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Peraturan Bupati Dharmasraya No 24 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Dharmasraya No 8 tahun 2023 tentang	1 tahun	1 tahun	100%	23.488.000	22.119.856	94,18 %	Masalah Tidak Ada		

No	Program Kegiatan	Kebijakan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
		Standar Harga Satuan pemerintah Kabupaten Dharmasraya tahun anggaran 2024									
2	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah										
4)	Sub Kegiatan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Peraturan Bupati Dharmasraya No 24 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Dharmasraya No 8 tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan pemerintah Kabupaten Dharmasraya tahun anggaran 2024	1 laporan	1 laporan	100%	6.503.500	5.062.150	77,84 %	Sebab sisanya anggaran dikarenakan melakukan bimtek secara gabung/terintegrasi oleh sekretariat sehingga menghemat pemakain BBM		

No	Program Kegiatan	Kebijakan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
5)	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Peraturan Bupati Dharmasraya No 24 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Dharmasraya No 8 tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan pemerintah Kabupaten Dharmasraya tahun anggaran 2024	1 laporan	1 laporan	100%	26.335.000	25.064.900	95,18 %	Masalah Tidak Ada		
3.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah										
6)	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Peraturan Bupati Dharmasraya No 24 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan	1 paket	1 paket	100%	5.000.000	4.616.000	92,32 %	Masalah Tidak Ada		

No	Program Kegiatan	Kebijakan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
		Bupati Dharmasraya No 8 tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan pemerintah Kabupaten Dharmasraya tahun anggaran 2024									
7)	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peraturan Bupati Dharmasraya No 24 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Dharmasraya No 8 tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan pemerintah Kabupaten	1 paket	1 paket	100%	52.755.000	52.265.000	99,07 %	Masalah Tidak Ada		

No	Program Kegiatan	Kebijakan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
		Dharmasraya tahun anggaran 2024									
8)	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peraturan Bupati Dharmasraya No 24 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Dharmasraya No 8 tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan pemerintah Kabupaten Dharmasraya tahun anggaran 2024	1 paket	1 paket	100%	11.195.000	10.643.000	95,07 %	Masalah Tidak Ada		
9)	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Peraturan Bupati Dharmasraya No 24 tahun 2023 tentang	2 paket	2 paket	98%	15.000.000	14.378.000	98,25 %	Masalah Tidak Ada		

No	Program Kegiatan	Kebijakan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
		Perubahan atas Peraturan Bupati Dharmasraya No 8 tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan pemerintah Kabupaten Dharmasraya tahun anggaran 2024									
10)	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Peraturan Bupati Dharmasraya No 24 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Dharmasraya No 8 tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan	3 paket	3 paket	99%	19.999.900	19.849.900	99,25 %	Masalah Tidak Ada		

No	Program Kegiatan	Kebijakan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
		pemerintah Kabupaten Dharmasraya tahun anggaran 2024									
11)	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Peraturan Bupati Dharmasraya No 24 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Dharmasraya No 8 tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan pemerintah Kabupaten Dharmasraya tahun anggaran 2024	1 laporan	1 laporan	95%	176.986.200	169.844.148	95,96 %	Masalah Tidak Ada		

No	Program Kegiatan	Kebijakan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											
12)	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Peraturan Bupati Dharmasraya No 24 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Dharmasraya No 8 tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan pemerintah Kabupaten Dharmasraya tahun anggaran 2024	400 lembar Materai 10000	400 lembar Materai 10000	100%	4.000.000	4.000.000	100 %	Masalah Tidak Ada		
13)	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Peraturan Bupati Dharmasraya No 24 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan	12 laporan	12 laporan	90%	91.879.996	82.860.177	90,18 %	Masalah Tidak Ada		

No	Program Kegiatan	Kebijakan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
		Bupati Dharmasraya No 8 tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan pemerintah Kabupaten Dharmasraya tahun anggaran 2024									
14)	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peraturan Bupati Dharmasraya No 24 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Dharmasraya No 8 tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan pemerintah Kabupaten	5 laporan	5 laporan	100%	10.440.000	10.386.500	99,49 %	Masalah Tidak Ada		

No	Program Kegiatan	Kebijakan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
		Dharmasraya tahun anggaran 2024									
15)	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Peraturan Bupati Dharmasraya No 24 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Dharmasraya No 8 tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan pemerintah Kabupaten Dharmasraya tahun anggaran 2024	12 laporan	12 laporan	100%	2.817.101.600	2.790.723.400	99,06 %	Masalah Tidak Ada		
5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											
16)	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan,	Peraturan Bupati Dharmasraya No 24 tahun	1 unit	1 unit	100%	16.700.000	16.035.950	96,02 %	Masalah Tidak Ada		

No	Program Kegiatan	Kebijakan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Dharmasraya No 8 tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan pemerintah Kabupaten Dharmasraya tahun anggaran 2024									
17)	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Peraturan Bupati Dharmasraya No 24 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Dharmasraya No 8 tahun 2023 tentang Standar Harga	10 unit	10 unit	100 %	105.800.000	101.314.850	95,76 %	Masalah Tidak Ada		

No	Program Kegiatan	Kebijakan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
		Satuan pemerintah Kabupaten Dharmasraya tahun anggaran 2024									
18)	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Peraturan Bupati Dharmasraya No 24 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Dharmasraya No 8 tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan pemerintah Kabupaten Dharmasraya tahun anggaran 2024	1 unit	1 unit	100%	9.827.598	9.679.200	98,49 %	Anggaran untuk rehap kantor tidak mencukupi sehingga belum semua atap yang bocor di perbaiki dan anggaran untuk perbaikan plapon tidak tersedia.	Mengoptimalkan anggaran yang ada untuk perbaikan kantor, usulan anggaran untuk perbaikan kantor di usulkan pada anggaran 2025 untuk perbaikan kantor.	

No	Program Kegiatan	Kebijakan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
6..	Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD										
	UPT RSUD SUNGAI RUMBAI										
19)	Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD UPT RSUD Sungai Rumbai		100%	100%	100%	7.206.494.798	6.199.062.469	86,02 %	Masalah Tidak ada		Terima kasih Atensinya/ masukan untuk UPT RSUD Sungai Rumbai,RS UD Sungai Rumbai Sudah mengajukan Penambahan Kebutuhan SDM terutama Dokter Spesialis Defenitif ke BKPSDM Kabupaten Dharmasraya. Pengajuan

No	Program Kegiatan	Kebijakan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
											<p>Kebutuhan SDM sudah di hitung berdasarkan ANJAB ABK RSUD Sungai Rumbai dan sudah di Usulkan melalui RENBUT. Usulan juga telah di sampaikan kepada Kementerian Kesehatan RI, namun dikembalikan ke Pemerintahan Daerah, untuk Proporsi spesialis menyesuaikan</p>

No	Program Kegiatan	Kebijakan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
											an dengan RSUD yang ada di Kabupaten Dharmasraya untuk pemerataan penempatannya. Terima kasih Atensinya/ masukan untuk UPT RSUD Sungai Rumbai
UPT PUSKESMAS											
20)	Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD UPT Puskesmas	1.Peraturan Bupati Dharmasraya No 24 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Dharmasraya	1 tahun	1 tahun	100%	18.063.028.698	14.719.065.045	81.48 %	1. terjadinya kelebihan anggaran tidak relevan 2. Kurangnya	1. Kedepannya menyusun perencanaan anggaran di sesuaikan dengan pendapatan BLUD 2. Mengadakan	

No	Program Kegiatan	Kebijakan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
		No 8 tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan pemerintah Kabupaten Dharmasraya tahun anggaran 2024							kompetensi SDM untuk pengelolaan BLUD	workshop untuk SDM tim BLUD tentang pengelolaan BLUD	
UPT LABKESDA											
21)	Sub Kegiatan :Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Labkesda	Peraturan Bupati Dharmasraya No 24 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Dharmasraya No 8 tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan pemerintah Kabupaten Dharmasraya	100 %	100%	100 %	273.572.248	224.226.494	81.96 %	Pendapatan yang bersumber dari Badan Layanan Umum Daerah dengan realisasi pencapaian Rp. 234.882.248 yaitu hanya 85.85 % sehingga realisasi belanja juga mengikuti nilai tersebut dengan persentase realisasi sebesar	Mengusahakan dengan maksimal agar pendapatan yang bersumber dari BLUD tercapai sesuai target yang telah di tentukan sebelum Triwulan 3 pada tahun berjalan, sehingga penyerapan	

No	Program Kegiatan	Kebijakan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
		tahun anggaran 2024							Rp. 224.226.494 dengan persentase yaitu 81,96 %	pada belanja juga dapat dimanfaatkan dengan maksimal.	
II. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT											
7. Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten											
22)	Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan		2 unit	2 unit	100%	560.566.000	500.090.435	89,21 %	Silfa anggaran dari sisa kontrak pekerjaan		
23)	Sub Kegiatan Pengembangan Puskesmas		100%	100%	100%	11.873.954.836	11.146.929.955	93,88 %	Silfa anggaran dari sisa kontrak pekerjaan		
24)	Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan /Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Permenkes No 19 Tahun 2024 tentang Puskesmas dan Juknis DAK Non Fisik No. 37 Tahun 2024	2 paket	2 paket	100%	290.000.000	274.500.000	94,6 %	Masalah Tidak Ada		

No	Program Kegiatan	Kebijakan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
25)	Sub Kegiatan Pengadaan dan pemeliharaan Alat Kalibrasi	Permenkes No 19 Tahun 2024 tentang Puskesmas dan Juknis DAK Non Fisik No. 37 Tahun 2024	491 AlKes	491 AlKes	100%	219.00.900	189.126.233	86,33 %	Terdapatnya Alat Kesehatan Yang sudah Rusak dan Tidak Bisa Dilakukan Kalibrasi	Menekan kan Kepada Puskesmas Agar Melakukan UPDATE Rutin data di Aplikasi Alat Kesehatan, Sarana dan Prasarana Kesehatan (ASPAK) karna data alat yang dikalibrasi di lihat dari data Aspak masing-masing Puskesmas	
26)	Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,	Permenkes No 19 Tahun 2024 tentang Puskesmas dan Juknis DAK Non Fisik No.	2 Paket	2 Paket	100%	6.560.003.660	6.369.279.115	97,9 %	Ada Item Obat yang tidak dapat display karena kendala Produksi dan bahan baku oleh	Mengupayakan Pembelian item Obat diawal tahun sesuai dengan produk	

No	Program Kegiatan	Kebijakan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Vaksin, Makanan dan Minuman Difasilitas Kesehatan	37 Tahun 2024							penyedia	kebutuhan obat yang dibutuhkan.	
27)	Sub Kegiatan Distribusi Alat Kesehatan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Media Habis Pakai, Vaksin makanan dan minuman ke Fasilitas Kesehatan	Permenkes No 37 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Tahun Anggaran 2024	80%	80%	100 %	114.338.600,-	111.134.800,-	97,2 %	Tidak Ada Masalah		
8.	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk Upaya Kesehaan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) Rujukan Tingkat Kab/Kota										
28)	Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2019	100%	88,04 %	88,04 %	216.733.000	204.220.342	94,2 %	1. Tingginya kematian ibu hamil yaitu sebanyak 6 orang	1. Pertemuan Evaluasi Hasil Superfisi Bidan Koordinator (BIKOR) di	

No	Program Kegiatan	Kebijakan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
		<p>Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatane</p> <p>2. SK BupatiI No: 188.45/231/KPTS-BUP/2022 Tentang Pembentukan Tim Manajemen dan Penyelenggaraan Audit Maternal Perinatal</p>							<p>2. Belum tercapainya target pelayanan ibu hamil sesuai standar</p> <p>3. Kurangnya kompetensi petugas dalam pelaksanaan ANC berkualitas.</p> <p>4. Masih ada tenaga kesehatan belum terlatih cara penggunaan USG di Puskesmas.</p>	<p>Puskesmas</p> <p>2. Memberikan bimbingan teknis dan pelaksanaan bedah khohor kepada petugas di puskesmas.</p> <p>3. Pelatihan ANC berkualitas bagi tenaga kesehatan di Puskesmas</p> <p>4. Mengadakan pelatihan USG untuk tenaga kesehatan di Puskesmas.</p>	

No	Program Kegiatan	Kebijakan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
		Surveilans dan Respon Kabupaten Dharmasraya									
29)	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	100%	92,54%	92,54%	187.520.800	113.336.500	60,4%	<ol style="list-style-type: none"> Sisa anggaran disebabkan karena masih adanya sisa sewa rumah tunggu persalinan dan untuk kegiatan AMP dan pengkajian honor narsumnya hanya dibayarkan 50% karena RSUD sudah dibawah naungan dinkes. Kurang efektifnya 	<ol style="list-style-type: none"> Menyusun perencanaan anggaran disesuaikan dengan kebutuhan dalam satu tahun Mengadakan pelatihan 	<ol style="list-style-type: none"> Mengaktifkan dan membentuk Puskesmas PONED, melaksanakan workshop atau pelatihan PONED Pelayanan Obstetri Noenatal Emergensi Dasar (PONED) merupakan pelayanan yang diberikan kepada ibu hamil, ibu bersalin,

No	Program Kegiatan	Kebijakan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
									kegiatan OJT untuk meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan di Puskesmas dalam pelayanan GARDA MANEO. sehingga Sarpras yang ada tidak termanfaatkan	PONED bagi petugas di puskesmas PONED.se hingga adanya peningkatan kompetensi bagi petugas dan sarpras yang tersedia dapat dimanfaatkan penggunaannya. dan membentuk tim Audit dan melaksanakan pengkajian	ibu nifas serta kegawatdar uratan bayi baik datang sendiri maupun rujukan dari poskesri atau pustu, sebab itu diperlukan tim yang terlatih untuk penanganan kegawatdar uratan dasar maternal dan neonatal di Puskesmas sehingga dapat mencegah

No	Program Kegiatan	Kebijakan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
									<p>3. Sarana Fasyankes (Pustu) belum sesuai standar untuk pelayanan ibu bersalin</p> <p>4. Masih ada persalinan di tolong oleh tenaga non kesehatan sebanyak 4</p>	<p>dan pembelajar an Audit Maternal dan Perinatal dengan melibatkan tim ahli.</p> <p>3. Puskesmas mengusulkan rehap pustu ke kemenkes RI melalui aplikasi shopy dan melalui APBD Kabupaten</p> <p>4. Meningkatkan edukasi pada keluarga tentang bahaya</p>	<p>terjadinya resiko komplikasi dan kematian pada ibu dan bayi sampai di rumah sakit.</p> <p>2. Melaksanakan akan monev, menyusun rencana aksi perbaikan kinerja bidan di Puskesmas dan melakukan evaluasi tindak lanjut perbaikan dari</p>

No	Program Kegiatan	Kebijakan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
									orang	melahirkan dengan tenaga non kesehatan	rencana aksi Bidan Koordinator Puskesmas. 3.Meningkatkan kompetensi bidan dengan mengadakan workshop atau pelatihan tentang kesehatan ibu dan anak untuk menurunkan AKI dan AKB 4.Meningkatkan promosi kesehatan kepada

No	Program Kegiatan	Kebijakan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
											masyarakat secara langsung maupun tidak langsung melalui media cetak dan elektronik tentang resiko kemungkinan terjadi apabila persalinan ditolong oleh tenaga non kesehatan dan tidak di fasilitas kesehatan.

No	Program Kegiatan	Kebijakan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
30)	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan 2. SK BUPATI No: 188.45/231/KPTS-BUP/2022 Tentang Pembentukan	100%	93 %	93 %	312.183.850	201.951.198	64,69 %	1. Masih tinggi angka kematian Bayi sebanyak 42 orang, dan anak balita sebanyak 6 orang. 2. Belum semua	1. Mengadakan pelatihan kepada petugas kesehatan tentang pelayanan kesehatan pada bayi sesuai standar dan penanganan kasus gawat darurat pada maternal dan neonatal dan perlu adanya jadwal pendampingan oleh tim ahli ke puskesmas tentang kasus kegawat daruratan dan sistem rujukan maternal dan neonatal. 2.Meningkatkan	

No	Program Kegiatan	Kebijakan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
		Tim Manajemen dan Penyelenggaraan Audit Maternal Perinatal Surveilans dan Respon (AMP SR) Kabupaten Dharmasraya							<p>bayi baru lahir dilakukan pemeriksaan SHK. Karena masih ada ibu bayi yang menolak anaknya di lakukan pemeriksaan atau di ambil sampel SHK nya sehingga capaian kinerja belum 100%</p> <p>3. Pemberian SHK pada bayi baru lahir di luar kabupaten masih ada yang belum sesuai dengan jadwal seperti ibu</p>	<p>edukasi kepada keluarga bayi tentang manfaat dari pemeriksaan SHK pada bayi</p> <p>3. Meningkatkan koordinasi dan MoU dengan Faskes di Kab.bungo tentang pengambilan sampel dan</p>	

No	Program Kegiatan	Kebijakan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
									<p>melahirkan di kabupaten Muaro Bungo mengambil sampel SHK pada Bayi di atas 72 jam. Sehingga hasilnya tidak valid.</p> <p>4. Setiap pengiriman sampel SHK yang hasilnya rujuk tidak diklemkan ke pembayaran</p>	<p>pemeriksaan SHK.</p> <p>4. Menyegerakan pembayaran laboratorium sampel SHK dan memverifikasi sampel yang akan dikirim ke laboratorium M-Djamil untuk meminimalisir sampel yang rujuk.</p>	

No	Program Kegiatan	Kebijakan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
									5. Pembayaran sampel SHK tahun 2024 hanya sampai di bulan Oktober sehingga terjadinya sisa anggaran pada kegiatan pelayanan kesehatan pada bayi bary lahir	5. Menyusun anggaran berdasarkan kebutuhan dari suatu kegiatan program.	
31)	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	1. Perpres no 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun	100%	96,11 %	96,11%	245.416.000	231.256.225	94,2 %	1. Masih rendahnya kunjungan balita ke posyandu setiap bulan sehingga pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita tersebut tidak terpantau.	1. Lebih mengoptimalkan pemantauan tumbuh kembang balita (SDIDTK) secara berkala melalui kegiatan terintegrasi layanan primer (ILP) di	

No	Program Kegiatan	Kebijakan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
		<p>2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan</p> <p>2.Peraturan Bupati No.14 Tahun 2015 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif</p>							<p>2.Capaian ASI Eksklusif masih rendah ini bisa menyebabkan faktor resiko terjadinya stunting pada balita.</p>	<p>posyandu dan berkoordinasi dengan linntas sektor untuk penanggulangan stunting, Dan melakukan supervisi fasilitatif layanan program KIA dan gizi di posyandu</p> <p>2.Edukasi untuk pemberian ASI Exklusif, memberikan MPASI dan pemberian makanan gizi seimbang pada keluarga balita.</p>	

No	Program Kegiatan	Kebijakan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
32)	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	100%	96,7 %	96,7 %	50.000.000	44.657.000	89,3 %	Pada saat pelaksanaan skrining kesehatan ke sekolah masih banyak siswa yang tidak hadir dengan alasan ada yang sakit, izin dan lain-lain	Melakukan kunjungan ulang ke sekolah untuk menjangkau peserta didik yang tidak hadir dan Melaksanakan pertemuan untuk penguatan stratifikasi UKS/M.	
33)	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan	100%	97,37 %	97,37 %	78.001.000	75.639.600	96,9 %	1. Belum semua pelayanan kesehatan usia produktif dilaporkan ke puskesmas oleh petugas kesehatan yang ada praktek	1. Membuat MOU/ perjanjian kerjasama dengan, bidan dan dokter praktek swasta	

No	Program Kegiatan	Kebijakan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
		Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan							swasta di wilayah kerjanya. 2..Belum semua sasaran usia produktif mengunjungi Posbindu PTM Untuk memeriksakan kesehatan 3.Perlu adanya penyegaran kompetensi CTU bagi tenaga kesehatan puskesmas.	untuk pelaporan pelayanan kesehatan usia produktif ke puskesmas. 2. Melakukan Mapping/ pengaturan jadwal pemeriksaan kesehatan sesuai dengan sasaran 3. Mengupayakan workshop dan evaluasi tentang CTU bagi tenaga kesehatan puskesmas.	

No	Program Kegiatan	Kebijakan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
34)	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	100%	96 %	96 %	33.401.000	29.875.000	89,4 %	1. Lansia resiko tinggi (restri) tidak semuanya terskrining disebabkan tidak datang ke fasilitas pelayanan kesehatan. Akses yang jauh dari fasilitas pelayanan kesehatan serta keterbatasan fisik (seperti menggunakan kursi roda) sehingga lansia restri sulit untuk datang ke fasilitas pelayanan kesehatan.	1. Mengupayakan skrining lansia melalui kegiatan posyandu ILP sehingga terpantau kesehatan lansia secara berkala.	Jumlah total posyandu lansia pada tahun 2023 sebanyak 209 posyandu tersebar di seluruh wilayah kerja puskesmas, Puskesmas dan Dinas Kesehatan berupaya mengaktifkan seluruh posyandu yang ada termasuk 25 posyandu lansia yang tidak aktif dengan cara :

No	Program Kegiatan	Kebijakan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
									2. Kurangnya alat ukur lansia, masing-masing puskesmas hanya mendapatkan satu alat ukur sehingga tidak cukup untuk kunjungan rumah pada lansia resti.	2. Meningkatkan promosi kesehatan dan edukasi pada keluarag tentang kepedulian masyarakat terhadap kesehatan lansia.	1. Mensosialisasikan ke masyarakat bahwa posyandu lansia bertransformasi ke posyandu terintegrasi ini bisa meningkatkan kunjungan lansia mendapatkan pelayanan di posyandu 2. Mengaktifkan peran kader maka perlu

No	Program Kegiatan	Kebijakan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
											<p>dilakukan pembinaan dan penyegaran kader posyandu lansia</p> <p>3. Meningkatkan UKBM (upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat dalam hal pemenuhan sarana prasarana pelaksanaan kegiatan posyandu</p>

No	Program Kegiatan	Kebijakan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
											<p>4. Melaksanakan monev dan bimtek kegiatan posyandu lansia pada puskesmas</p> <p>5. Meningkatkan edukasi kepada masyarakat tentang manfaat Caregiver Kesehatan Lansia dan Perawatan Lansia jangka</p>

No	Program Kegiatan	Kebijakan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
											panjang. 6. Melakukan Kunjungan Homecare untuk lansia yang ketergantungan Berat dan berkoordinasi dengan tim pengelola PTM (penyakit tidak menular).
35)	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023	100%	99,32%	99,32%	228.197.140	220.726.129,-	96,72 %	1) Pelayanan kesehatan sesuai standar pada penderita hipertensi belum	1) Membuat MOU/Perjanjian Kerjasama dengan dokter, bidan praktek	

No	Program Kegiatan	Kebijakan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
		<p>tentang Kesehatan.</p> <p>2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Tidak Menular.</p> <p>3. Surat Keputusan Bupati Dharmasraya No. 188.45/304 /KPTS-BUP/2023 tentang Pembentuk</p>							<p>mencapai target (99,58%), hal ini bisa disebabkan belum semua praktek swasta yang tidak melaporkan kunjungan penderita hipertensi ke PKM</p> <p>2) Mengontrol pengobatan rutin dan pengawasan minum obat pada penderita hipertensi cukup sulit dilakukan karena penderita</p>	<p>swasta dan klinik swasta tentang laporan kunjungan penderita hipertensi.</p> <p>2) Melakukan Mapping /pengaturan jadwal pemeriksaan kesehatan PTM keseluruhan sasaran dan memberdayakan Kader Kesehatan PTM untuk menghimbau sasaran agar cek</p>	

No	Program Kegiatan	Kebijakan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
		an Tim Pelaksanaan Inovasi Kelompok dan Tokoh Keluarga Peduli Sasaran Wilayah Hipertensi Kabupaten Dharmasraya.							hipertensi tidak rutin cek kesehatan ke fasilitas kesehatan atau possbindu PTM.	kesehatan secara berkala dan pemantauan minum obat.	
36)	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71	100%	99,22%	99,22%	135.125.000	131.359.260,-	97,21 %	1. Pelayanan kesehatan sesuai standar pada penderita Diabetes Melitus belum mencapai target (99,10%)	1. Membuat MOU/Perjanjian Kerjasama dengan BPM, DPM dan klinik swasta dalam pelaporan dan pelayanan	

No	Program Kegiatan	Kebijakan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
		<p>Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Tidak Menular.</p> <p>3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan.</p>							<p>2. Belum semua pemeriksaan orang dengan Diabetes Melitus terlaporkan karena pasien yang diperiksa di DPM (Dokter Praktek Mandiri), BPM (Bidan Praktek Mandiri) dan Klinik belum dilaporkan ke Fasyankes</p> <p>3. Adanya tugas rangkap dari pengelola program</p>	<p>penderita Diabetes Melitus.</p> <p>2. Mengadakan pelatihan bagi pengelola program PTM dipuskesmas dan mengusulkan supaya ada yang membantu pengelola PTM.</p>	

No	Program Kegiatan	Kebijakan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
									<p>PTM Puskesmas sehingga sulitnya membagi waktu untuk pelaksanaan program PTM.</p> <p>4. Pengobatan rutin pada penderita Diabetes Melitus cukup sulit dilakukan karena kurangnya pengawasan minum obat dan tidak melakukan pemeriksaan tekanan darah rutin ke</p>	<p>3. Melakukan Mapping/ pengaturan jadwal pemeriksaan kesehatan yang sesuai dengan sasaran untuk menjangka u seluruh sasaran hipertensi</p> <p>4. Memberdayakan Kader Kesehatan PTM untuk menjangka u sasaran dan pemantaun pengobatan</p>	

No	Program Kegiatan	Kebijakan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
									Posbindu/Fasilitas Kesehatan.	.	
37)	Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	<ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Tidak Menular. Peraturan Menteri 	100	100%	100%	50.000.000	.48.390.300,-	96,78 %	<ol style="list-style-type: none"> Belum optimalnya koordinasi Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat (TPKJM) yang sudah dibentuk tingkat Kabupaten Dharmasraya dalam pengawasan dan pembinaan pada ODGJ Belum terbentuknya Tim Pelaksana 	<ol style="list-style-type: none"> Mengoptimalkan TPKJM tingkat kabupaten minimal melaksanakan rapat koordinasi satu kali dalam setahun Membentuk TPKJM tingkat kecamatan 	

No	Program Kegiatan	Kebijakan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
		Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan.							Kesehatan Jiwa Masyarakat (TPKJM) tingkat Kecamatan 3. Masih adanya pasien ODGJ berat yang putus pengobatan dan pasien pasung sebanyak 7 orang	dalam penanganan pasien ODGJ Berat. 3. Meningkatkan skrining kesehatan jiwa untuk mengintervensi secara dini adanya gangguan jiwa dan melakukan pemantauan pada ODGJ berat yang putus obat dan pasien pasung, memberikan edukasi kepada keluarga	

No	Program Kegiatan	Kebijakan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
									4. Masih adanya tenaga pengelola program yang belum dilatih karena adanya mutasi atau pergantuan pengelola program di	agar secara rutin memberikan obat kepada pasien serta peningkatan pemahaman terkait di larang pasung pada ODGJ. 4. Mengadakan pelatihan bagi pengelola program keswa di puskesmas terutama untuk Dokter, Perawat	

No	Program Kegiatan	Kebijakan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
									puskesmas.	dalam melaksanakan deteksi dini dan pelayanan kesehatan pada ODGJ sesuai standar	
38)	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1. SE Nomor: HK.02.02/III.1/936/2021 tentang Perubahan Alur Diagnosis dan Pengobatan Tuberkulosis di Indonesia 2. PERPRES no. 67 Tahun 2021	100	100%	100%	348.509.900	343.921.805	98.68 %	Masih ada Tempat Praktek Mandiri Dokter (TPMD) dan klinik yang belum terdaftar di SITB Online sehingga pencatatan masih secara manual dan belum optimal	Meningkatkan kerjasam jejaring (DPM, Klinik) terhadap pengelola program di Puskesmas untuk pengurusan atau memperpanjang SIP dan SIO harus melengkapi	

No	Program Kegiatan	Kebijakan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
		tentang Penanggulangan TBC								salah satu syarat yaitu adanya laporan Program Prioritas (TB, DM, Hipertensi).	
39)	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	1. Kepmenkes RI No. HK. 01.07/Menk es/90/2019 Tentang Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana HIV 2. Permenkes RI Nomor 21 tahun 2013 tentang Penanggulangan	100%	100%	100%	50.000.000	47.473.800,-	94,95 %	Capaian pemeriksaan HIV sudah 100 % tetapi belum mencakup seluruh populasi kunci (LSL, IMS, Waria) karena tidak adanya penjangkau di lapangan untuk membantu dalam menjangkau orang beresiko terinfeksi HIV/AIDS.	Kerja sama dengan kelompok penjangkau untuk menjangkau orang beresiko terinfeksi HIV	

No	Program Kegiatan	Kebijakan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
		HIV/AIDS									
40)	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		100%	100%	100%	41.000.000	34.995.000	85,35 %	<p>1.Sisa Anggaran sebanyak Rp. 6.005.000,- karena adanya kelebihan penganti pembayaran transportasi tenaga non kesehatan.</p> <p>2.Pelaksanaan pelayanan kesehatan gizi sudah dilakukan di Posyandu namun belum maksimal karena tempat pelaksanaannya belum memenuhi standar untuk</p>	<p>1. Mengupayakan menyusun anggaran disesuaikan dengan kebutuhan.</p> <p>2.Mengusulkan di kegiatan musrembang nagari untuk pengadaan kelengkapan sarana dan prasarana posyandu sehingga mudah untuk pelaksanaan</p>	<p>1. Melaksanakan sosialisasi dan meningkatkan edukasi kepada keluarga Balita Gizi buruk, gizi kurang dan stunting . Dengan cara :</p> <p>a. Memberikan Asi Eksklusif kepada bayi dari</p>

No	Program Kegiatan	Kebijakan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
									<p>pelaksanaan Integrasi Layanan Primer (ILP)</p> <p>3. Pelaksanaan pelatihan kader sudah dilakukan namun kemampuan dasar kader belum ditetapkan dengan strata kompetensi kader posyandu</p>	<p>pelayanan kesehatan terintegrasi dengan program kesehatan lainnya, Untuk sementara pelaksanaan Posyandu dilakukan secara bertahap (2 hari).</p> <p>3. Perlu dilakukan workshop/pelatihan kader 3. Menetapkan strata posyandu secara bertahap sesuai dengan kompetensi kader posyandu.</p>	<p>sejak lahir sampai usia 6 bulan, dilanjutkan dengan memberikan MP-ASI yang bergizi lengkap dan seimbang</p> <p>b. Memberikan MP-ASI yang bergizi dan kaya protein hewani</p>

No	Program Kegiatan	Kebijakan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
											<ul style="list-style-type: none"> untuk untuk bayi yang berusia diatas 6 bulan c. Membe rikan makana n bergizi lengkap dan seimba ng sesuai cengan kebutuh an anak d. Menera pkan pola asuh dan Meman tau perkem

No	Program Kegiatan	Kebijakan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
											<p>bangan anak dan membawa balita ke Posyandu secara berkala dan mengoptimalkan kegiatan pemantauan pertumbuhan balita stunting dan gizi kurang di Pos Gizi</p>

No	Program Kegiatan	Kebijakan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
											<p>2. Mensosialisasikan kembali pelaksanaan PMT Lokal kepada masyarakat di tingkat Nagari</p> <p>3. Perlunya dukungan sari semua pihak dan lintas sektor terkait terhadap pelaksanaan</p>

No	Program Kegiatan	Kebijakan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
											naan PMT local di Nagari dalam rangka pemenuhan kebutuhan Balita dan Ibu Hamil KEK dan Percepatan penurunan Stunting di Kabupaten Dharma sraya
41)	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan		40%	40%	100%	141.000.000,-	135.126.200,-	95.83 %	1.Belum semua terlaksananya pengukuran	1.Membentuk tim dan rencana	

No	Program Kegiatan	Kebijakan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Kesehatan Kerja dan Olah raga								<p>kesehatan bagi masyarakat, pelajar dan ASN secara keseluruhan, tapi untuk kebugaran haji sudah terlaksana sesuai dengan jumlah jemaah haji yang akan menunaikan ibadah haji</p> <p>2.Hasil dari pengukuran kebugaran belum semua dianalisa oleh puskesmas</p>	<p>kegiatan dalam RKA Dinkes dan Puskesmas Kegiatan kesehatan olahraga pada pengukuran kebugaran pada masyarakat, ASN dan pelajar pada tahun 2022. Hasil pengukuran kebugaran jasmani anak sekolah, kesehatan pekerja, dan jemaah haji untuk mengidentifikasi potensi masalah kesehatan yang</p>	

No	Program Kegiatan	Kebijakan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
									3. Perlunya edukasi dan motivasi bagi petugas dalam pembinaan dan pembentukan Pos UKK pada masing-masing puskesmas.	perlu ditangani di wilayah kerja Puskesmas 3. Membuat perencanaan dan dukungan anggaran untuk edukasi petugas agar segera melakukan pembinaan dan dan pembentukan pos UKK yang wajib terbentuk minimal 1 pos ukk pada masing-masing puskesmas.	
42)	Sub Kegiatan Pengelolaan pelayanan kesehatan	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 5	75%	75%	100%	562.585.000,-	560.774.000,-	99,67 %	1. Kondisi Instalasi pengolahan air limbah (IPAL)	1.. Memberikan motivasi dan edukasi ke Puskesmas	1. Untuk Puskesmas sudah memiliki

No	Program Kegiatan	Kebijakan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	lingkungan	Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah Medis dan B3 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 6 Tahun 2021 Tentang Izin Lingkungan							Puskesmas sebanyak 9 puskesmas kondisi baik dan 6 dalam kondisi rusak. 2. Untuk Izin lingkungan puskesmas belum ada melakukan pengurusan sesuai dengan permenlhk no 6 tahun 2021 3. Tempat penyimpanan sampah B3 dan sampah medis yang belum memenuhi standar secara permenlhk no 5 tahun 2021	untuk menggarkan dalam RAB Puskesmas dalam pembiayaan perbaikan dan pemeliharaan IPAL yang merupakan indikator pokok dalam izin oprasional puskesmas. 2. Puskesmas agar menganggarkan dalam RAB puskesmas untuk melakukan biaya perawatan PAL dan bagi puskesmas yang IPAL	MOU pengelolaan limbah medis kepada pihak ketiga. 2. Melakukan edukasi kepada pemilik praktek mandiri dan klinik fasilitas pelayanan agar melakukan MOU kepada pihak ketiga dalam pengelolaan

No	Program Kegiatan	Kebijakan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
									<p>4.Masyarakat belum merasakan pentingnya tempat BAB yang baik menurut kesehatan</p> <p>5.Kualitas air minum yang diperiksa dari 19 parameter Pemeriksaan banyak yang tidak memenuhi syarat sesuai dengan Permenkes 32 Tahun 2017 tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan</p>	<p>sudah baik agar dilakukan izin IPAL dan berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dalam melengkapi izin lingkungan karena untuk dokumen UKL/UPL diwajibkan untuk melakukan izin lingkungan.</p> <p>.3.Puskesmas untuk segera melakukan pembelian Freezer pada tempat yang memenuhi</p>	<p>limbah medis melalui organisasi profesi yang memiliki tempat pelayanan kesehatan.</p> <p>3. Melakukan kolaborasi dengan perizinan agar tempat praktek memiliki MOU limbah medis yang merupakan indikator</p>

No	Program Kegiatan	Kebijakan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
									Persyaratan Kesehatan Air untuk Keperluan Higiene Sanitasi, dan Permenkes 43 tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum	syarat kesehatan digunakan untuk menyimpan limbah medis infeksius, patologis, benda tajam pada temperatur sama dengan atau lebih kecil dari 0oC (nol derajat celcius) sebelum dilakukan pengangkutan limbah, pengolahan limbah, dan/atau penimbunan limbah B3, sehingga limbah tersebut	yang harus dilengkapi. 4. MOU pihak keetiga dalam pengelolaan limbah medis merupakan suatu kewajiban yang harus dimiliki oleh praktek mandiri dan klinik fasilitas pelayanan kesehatan.

No	Program Kegiatan	Kebijakan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
										<p>dapat disimpan sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari pada TPS Limbah B3.</p> <p>4.Selalu Mengedukasi masyarakat agar melaksanakan implementasi keberlanjutan dari STBM memenuhi syarat kesehatan. Melakukan koordinasi ke propinsi ,lintas sektor pembangunan jamban sehat</p> <p>5.Memberikan</p>	<p>5. Melakukan edukasi kepada pihak nagari agar masyarakat kita akses terhadap jamban sehat.</p> <p>6. Selalu memberikan dukungan kepada masyarakat dalam merubah perilaku stop Buang Air Besar sembarangan</p>

No	Program Kegiatan	Kebijakan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
										informasi kepada puskesmas dan masyarakat agar mempergunakan air minum aman yang memenuhi syarat kesehatan salhasatunya dengan direbus dan bagi pengguna DAM agar memastikan hasil pemeriksaan Labor memenuhi syarat.	(BABS)

No	Program Kegiatan	Kebijakan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
43)	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		100%	100%	100%	250.000.000	247.405.150	98,96 %	1. Anggaran yang tersedia hanya untuk pelatihan tenaga kesehatan di puskesmas dan pustu/poskesri 2. Masih kurangnya kemampuan petugas dalam melakukan komunikasi publik speaking pada masyarakat.	1.Mengoptimalkan anggaran untuk peningkatan kompetensi petugas di 15 puskesmas dan 15 pustu dalam wilayah kerja puskesmas 2.Perlu dilakukan pelatihan publik speaking bagi tenaga NaKes di puskesmas.	
44)	Sub Kegiatan Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1. Permenkes Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis	1 dokumen	1 dokumen	100%	97.010.000	96.366.700	99,33 %	Masih ada Puskesmas yang belum aktif dalam penemuan Kasus PD3I	Dinkes melakukan Monitoring dan evaluasi secara	

No	Program Kegiatan	Kebijakan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
		Penyakit Menular Tertentu yang dapat menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan. Permenkes Nomor 45 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan.							sehingga Dinkes tidak melakukan Penyelidikan Epidemiologi ke 15 Wilayah Puskesmas sehingga realisasi anggaran tidak sesuai dengan perencanaan kegiatan diawal.	berkelanjutan sehingga Puskesmas yang belum aktif pelaksanaan surveilan mampu dilakukan evaluasi dan dilakukan tindak lanjut.	
45)	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Napza	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan	100%	100%	100%	59.400.000	57.994.554,-	97,63 %	1. Di saat melakukan skrining di sekolah belum ditemukan kasus penyalahgunaan NAPZA (0,0%)	1.Meningkatkan promosi tentang Kesehatan Jiwa dan Napza, dan skrining dengan tujuan agar	

No	Program Kegiatan	Kebijakan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
		Wajib Laport dan Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.							2.Kegiatan skrening Napza belum terintegrasi dengan skrening PTM 3.Masih adanya stigma negatif di masyarakat terkait kesehatan jiwa dan Napza.	masyarakat proaktif terhadap kesehatan jiwa dan NAPZA di lingkungannya. 2.Mengintegrasikan kegiatan Napza dengan skrening di posyandu PTM. 3.Memberikan edukasi pada masyarakat tentang bahaya penggunaan zat adiktif. 4.Melakukan Mapping/ pengaturan jadwal dan memberdayakan kader kesehatan	

No	Program Kegiatan	Kebijakan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
										untuk skrining ke seluruh sasaran pelayanan kesehatan jiwa dan Napza	
46)	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1. Permenkes Nomor 50 tahun 2017 tentang standar baku mutu Kesehatan lingkungan dan persyaratan Kesehatan untuk vektor dan binatang pembawa penyakit serta pengendaliannya 2. Peraturan	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	174.490.000	174.028.354	99,74	1. Beban kerja atau rangkap program dari petugas sehingga kurang fokus dalam pelaksanaan Program 2. Masih banyak	1. Sebaiknya program terutama yang masuk dalam indikator SPM tidak di berikan rangkap Program sehingga petugas bisa lebih fokus dalam pelaksanaan Program 2. Puskesmas diharapkan	

No	Program Kegiatan	Kebijakan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
		Presiden Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pengendalian Zoonosis 3. Permenkes Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Kusta							puskesmas yang belum melibatkan lintas sektor dalam pengendalian dan pencegahan penyakit berbasis binatang	dapat meningkatkan Kerjasama dengan lintas sektor sehingga pencegahan penyakit berbasis binatang bisa teratasi	
47)	Sub Kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan	Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang	100%	100%	100%	23.440.170.400	23.180.547.332,-	98.89 %	Berdasarkan hasil audit BPKP dan BPK RI di Kementerian Kesehatan atas data PBI JK periode bulan Januari sd September 2021 dan BPK RI atas data PBI JK	BPJS Kesehatan melakukan kompensasi atau pengembalian kelebihan iuran PBI JK ke Kas Daerah. Dan dilakukan rekonsiliasi	1. Melakukan verifikasi ulang data melalui aplikasi SIGNG Dinas Sosial dan Update

No	Program Kegiatan	Kebijakan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
		Jaminan Kesehatan		Pemda) sejumlah 61.745 jiwa dengan alokasi anggaran Rp. 22.820.952.000 serta realisasi sebesar Rp. 22.775.244.800,- atau 99,79%, dan Bantuan Iuran kelas III Mandiri sebanyak 15.319 jiwa dengan Alokasi Anggaran Bantuan Iuran Mandiri kelas III aktif sebesar Rp. 572.171.600,- dengan realisasi sebesar Rp.					periode bulan Januari sd November 2022 terdapat peserta PBI JK yang data ganda kepesertaan, tidak padan dengan data Dukcapil, dan data sudah meninggal yang sudah dikonfirmasi dalam data pelayanan peserta tidak memiliki riwayat pelayanan di FKTP maupun di FKTR, Sesuai dengan PMK 51 Tahun 2024 tentang perubahan dari PMK 78 Tahun	oleh BPJS Kesehatan dan Pemerintah Daerah untuk melakukan penghitungan kelebihan pembayaran atau kopensasi pembayaran iuran PBPU mandiri kelas III dan Hasil penghitungan rekonsiliasi atas kelebihan pembayaran bantuan iuran PBPU Mandiri kelas III dapat dikompensasi untuk pembayaran bulan berjalan atau tahun selanjutnya	data kepesertaan agar penduduk yang miskin belum mempunyai jaminan kesehatan bisa terlayani dan menjadi peserta penerima bantuan iuran PBPU Pemda serta melakukan verifikasi pada data

No	Program Kegiatan	Kebijakan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
				349.995.200,- atau 61,16% , ditambah dengan kegiatan penunjang seperti pembinaan ke puskesmas sebesar Rp. 47.046.800,- dengan realisasi sebesar Rp. 46.153.058,- atau 98,10%					2022 dan hasil tindak lanjut LHP BPK RI Tahun 2023, terdapat selisih jumlah peserta bantuan iuran yang sudah ditagihkan ke pemerintah daerah sejak bulan Februari 2021 sd Juli 2024.	dengan total kompensasi Rp. 334.630.800,- sesuai dengan berita acara yang telah ditanda tangani oleh kedua belah pihak (BPJS Kesehatan dan Dinas Kesehatan).\	pekerja swasta/ masyarakat mampu yang terdaftar menjadi peserta PBPU Pemda. 2. Telah melakukan rekonsiliasi setiap bulan antara Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan BPJS Kesehatan

No	Program Kegiatan	Kebijakan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
											Cabang Solok 3. Ketersediaan anggaran yang belum optimal yang mempengaruhi capaian masyarakat yang terdaftar dalam kepesertaan JKN.
48)	Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas	1.Permendagri No.12 Tahun 2023 tentang pengelolaan dana bantuan operasional kesehatan pusat kesehatan	100%	90%	90%	659.268.500,-	622.014.266,-	94.3%	1.Terlambatnya puskesmas melaksanakan kegiatan sehingga tidak sesuai dengan rencana kegiatan.	1. Meyesuaikan rencana kerja dengan aliran anggaran sehingga tidak ada alasan bagi puskesmas terlambat	

No	Program Kegiatan	Kebijakan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
		masyarakat pada pemerintah daerah. 2.Permenkes no 37 tahun 2023 tentang juknis dana bantuan operasional kesehatan anggaran 2024							2. Penginputan realisasi diaplikasi E-renggar sering terjadi ketidak sinkronan pelaporan raelisasi dengan rekening koran sehingga menyebabkan keterlambatan pelaporan keuangan sebagai syarat salur anggaran di puskesmas	dalam melaksanakan kegiatan 2. Terlaporkan realisasi yang benar sesuai dengan rekening koran sehingga tepat waktu dalam penggunaan anggaran.	
49)	Sub Kegiatan Operasional Fasilitas Kesehatan Lainnya	Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 17 Tahun 2023	100 %	100 %	100%	366.200.000,-	359.710.796	98,2 %	Tidak ada masalah		

No	Program Kegiatan	Kebijakan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
		Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2024									
50)	Sub Kegiatan Pelaksanaan akreditasi Fasilitas kesehatan di kabupaten/kota	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi darah, Tempat Paraktik	100%	100%	100%	Rp.45.000.000,-	Rp.43.206.020,-	96 %	<ol style="list-style-type: none"> Masih Kurangnya pemahaman dan implementasi puskesmas dalam menerapkan nilai-nilai akreditasi pasca akreditasi. Belum semua puskesmas menyampaikan laporan 	<ol style="list-style-type: none"> Puskesmas diharapkan tetap menerapkan nilai mutu sesuai standar akreditasi pasca akreditasi dilaksanakan puskesmas diharapkan dapat melaporkan 	

No	Program Kegiatan	Kebijakan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
		Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi;							Mutu dan akses pelayanan kesehatan 3. Belum semua puskesmas menindaklanjuti hasil rekomendasi surveyor berupa Perencanaan Perbaikan Strategis (PPS) di DFO walaupun sudah dilakukan pertemuan terkait tindak lanjut rekomendasi surveyor	laporan mutu kepada Dinas Kesehatan secara berkala 3. Puskesmas diharapkan dapat menindaklanjuti hasil rekomendasi surveyor berupa Perencanaan Perbaikan Strategis (PPS) di DFO sesuai dengan arahan yang sudah diberikan.	

No	Program Kegiatan	Kebijakan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
51)	Sub Kegiatan Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan atau Kejadian Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal	<p>1. Permenkes Nomor 12 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi</p> <p>2. SK Bupati Nomor : 100.3.3.2/304/KPTS-BUP/2024 Tentang Pokja PIN polio Kabupaten Dharmasraya tahun 2024</p> <p>3. SK Bupati Dharmasraya No : 100.3.3.2/358/KPTS-BUP/2024 tentang</p>	1 dokumen	1 dokumen	100%	27.060.000	26.680.000	98,59 %	Tidak semua kasus KIPI ada di masing-masing Puskesmas sehingga tidak semua puskesmas dilakukan Investigasi	Puskesmas harus tetap melaporkan kasus KIPI baik itu KIPI nom serius maupun KIPI serius sehingga Dinkes mengetahui KIPI apa saja yang terjadi di wilayah Puskesmas.	

No	Program Kegiatan	Kebijakan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
		pembentukan Tim Inovasi Sumbar Rancak pada Dinkes									
52)	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1. Permenkes Nomor 1501/Menk es/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang dapat menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan 2. Permenkes Nomor 12 tahun 2017 tentang Penyelengg	1 dokumen	1 dokumen	100%	110.132.000	108.975.250	98,94 %	Masih ada Wilayah Puskesmas yang masyarakat dan sekolahnya menolak anaknya di berikan imunisasi sehingga kegiatan rakor dengan sekolah ada yang tidak terlaksana.	Dineks melakukan koordinasi dan Monev berkelanjutan dengan OPD terkait sehingga target indikator bisa tercapai.	

No	Program Kegiatan	Kebijakan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
		araan Imunisasi 3. SK Bupati Nomor : 100.3.3.2/30 4/KPTS- BUP/2024 Tentang Pokja PIN polio Kabupaten Dharmasray a tahun 2024 4. Surat Edaran Bupati Nomor : 100.3.4.2/11 27/DINKES -2024 tentang dukungan dalam rangka pelaksanaan									

No	Program Kegiatan	Kebijakan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
		PIN Polio Kab Dharmasraya tahun 2024. 5. SK Bupati Dharmasraya No : 100.3.3.2/358/KPTS-BUP/2024 tentang pembentukan Tim Inovasi Sumbar Rancak pada Dinkes									
53)	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	1. Permenkes Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Malaria	100%	100%	100%	54.430.200	51.843.405	95,25 %	Pengadaan BMHP Malaria telah dilaksanakan, sisa anggaran diakarenakan ada perbedaan harga pada	Survei harga BMHP pada beberapa Penyedia barang yang berbeda sehingga didapatkan	

No	Program Kegiatan	Kebijakan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
									saat awal perencanaan dengan pelaksanaan pengadaan	harga yang sesuai dengan perencanaan.	
9. Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi											
54)	Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Bupati Dharmasraya No 24 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Dharmasraya No 8 tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan pemerintah Kabupaten Dharmasraya tahun anggaran 2024	60%	60%	100%	131.012.250	115.101.571	87,86 %	1. Terjadinya ketidak sinkronan data Profil Kesehatan antara Dinas Kesehatan Kab. Dharmasraya dengan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat 2. Adanya sisa anggaran pada BBM karena pada tahun 2025 kegiatan bintek ke puskesmas pada triwulan tiga terintegrasi dengan program	Mengadakan pertemuan Desk untuk verifikasi data Profil Kesehatan seluruh UPT dan data kesehatan yang ada di seluruh bidang di Dinas Kesehatan	

No	Program Kegiatan	Kebijakan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
									lain.		
10.	Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kab/Kota										
55)	Sub Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Permenkes Nomor 30 Tahun 2022 tentang Indikator Nasional Mutu pelayanan kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktek Mandiri Dokter dan Tempat Praktek Dokter Gigi ;	17 unit	17 unit	100%	248.958.100	226.731.208	91,07 %	1. Belum semua Puskesmas mengisi laporan online INM tepat waktu 2. Belum semua	1. Koordinasi dengan puskesmas agar mengisi laporan INM setiap bulan karena laporan INM terbaca di kementerian kesehatan dan menjadi salah satu syarat dilaksanakannya akreditasi 2. Selain kepatuhan	

No	Program Kegiatan	Kebijakan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
									puskesmas mencapai target INM 3. Belum semua Klinik dan TPMD mengisi laporan INM di aplikasi	pengisian INM puskesmas diharapkan dapat memperhatikan capaian Indikator INM 3. Berkoordinasi dan menyampaikan kepada TPMD dan Klinik untuk pengisian INM setiap bulan	

No	Program Kegiatan	Kebijakan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
III PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA KESEHATAN											
11. Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan Untuk UKP dan UKM DI Wilayah Kab/Kota											
56)	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Aplikasi Si-SDMK dan Aplikasi Rencana Kebutuhan Kementerian Kesehatan RI dan UU Kesehatan No 17 Tahun 2023	5Kegiatan	5.Kegiatan Pemutakhiran data SDMK, Pembinaan RKO, Pembinaan kepegawaian, Sosialisasi aturan kepegawaian	100 %	461.937.000	438.005.633	94,82 %	1. Telah berlakukanya pengurusan Surat Izin Praktik melalui MPPD di Kab. Dharmasraya masih banyak tenaga kesehatan yang belum paham dengan aplikasi SISDMK yang merupakan salah satu persyaratan untuk penerbitan	1. Melakukan pendampingan sosialisasi atau pengimputan SISDMK dan MPPD bersama DPMPTSP Kab. Dharmasraya. 2. Penyusunan rencana kebutuhan tahun 2025	1. Sudah adanya anggaran melalui DAK Non Fisik dari kementerian kesehatan untuk pelatihan peningkatan kompetensi petugas di puskesmas 2. Mutasi pegawai di puskesmas, karena terkait dengan analisa jabatan dan analisa beban kerja

No	Program Kegiatan	Kebijakan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
									<p>maupun perpanjangan SIP pada nakes terutama untuk tenaga kesehatan yang berpraktik mandiri.</p> <p>2. Masih ada 2 puskesmas yang belum terpenuhi untuk 9 jenis tenaga kesehatan yang harus ada di fasyankes dengan jenis tenaga ATLM di Puskesmas Sitiung IV dan</p>	<p>dan pemutakhiran data anjab/abk fasyankes agar terpenuhinya 9 jenis tenaga di fasyankes.</p> <p>3. Pemenuhan melalui Formasi CPNS dan PPPK Formasi 2024.</p> <p>4. Penugasan Khusus tenaga Kesehatan Nusantara Sehat.</p>	(ANJAB ABK) di UPT Puskesmas untuk pemerataan kepegawaian.

No	Program Kegiatan	Kebijakan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
									Kesehatan Lingkungan. pada Puskesmas Padang Laweh		
12.	Kegiatan Pengembangan Mutu Dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										
57)	Sub Kegiatan Pengembangan Mutu Dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peraturan Bupati Dharmasraya No 24 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Dharmasraya No 8 tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan pemerintah Kabupaten Dharmasraya tahun anggaran 2024	50 Orang	50 Orang	100%	1.056.909.000	1.012.683.989	95.82%	Masalah Tidak ada		

No	Program Kegiatan	Kebijakan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
IV. PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN											
14. Kegiatan Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)											
58)	Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 11 Tahun 2023	100%	100%	100%	63.730.000	57.030.000	89,48 %	Masalah Tidak Ada		
15. Kegiatan Penerbitan sertifikat Produksi Pangan Industri rumah tangga dan Nomor PIRT sebagai izin Produksi, untuk Produk makanan minuman tertentu yang dapat di Produksi Oleh Industri Rumah tangga											
59)	Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut	Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2021	100%	90%	90%	308.601.000	306.289.000	99,25 %	Masih banyaknya Indusrti Skala Kecil hingga sakala menengah yang	Perlu Koordinasi Lintas sektor dan Komitmen bersama (Koperindag,	1. Memberi masukan Kepada DPMTS P agar mengup

No	Program Kegiatan	Kebijakan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 11 Tahun 2023							sudah Terdaftar sebagai IRTP dan mengurus izin tetapi banyak yang belum mendapatkan Penyuluhan Keamanan Pangan dalam rangka penerbitan SPP-IRT	DPMTSP, LOKA POM, dan Bagian Perekonomian) untuk dapat mendorong Industri Rumah Tangga Pangan yang telah mengurus perizinan agar mengikuti penyuluhan Keamana Pangan sehingga mendapatkan sertifikat Produksi Pangan (SPP-IRT) sehingga dapat meningkatkan efektifitas Pengawasan Produksi dan	ayakan adanya Keputusan Bupati/Peraturan Bupati agar setiap IRTP yang mengurus Perizinan sebelum dikeluarkan izinnya harus mendapatkan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah

No	Program Kegiatan	Kebijakan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
										Peredaran pangan Industri yang ada serta dapat mewujudkan Produk IRTP yang mampu bersaing di pasaran	2. Bimtek Keamanan Pangan kepada Penanggung Jawab / Pemilik IRTP dengan Melibatkan DPMTSP, Koperindag, LOKA POM dan Tenaga PKP 3. Pengujian

No	Program Kegiatan	Kebijakan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
											Sampel Produk IRTP ke Labor Balai POM Di padang
V. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN											
16. Kegiatan Advokasi Pemberdayaan Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kab/Kota											
60)	Sub Kegiatan Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MEN KES/2025/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer	100%	100%	100%	251.270.000	149.808.481	60 %	1. Adanya alokasi dana bersumber DAK NF untuk kegiatan Akreditasi Puskesmas (lokus untuk Puskesmas Silago dan Padang Laweh) yang di pindahkan ke rekening ini tapi tidak bisa di	1.Sudah dilakukan koordinasi dengan PJ DAK NF di Kementerian Kesehatan tentang Penggunaan Dana DAK NF tersebut tapi tetap tidak bisa digunakan karena penggunaannya hanya	

No	Program Kegiatan	Kebijakan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
									gunakan karena Puskesmas tersebut sudah melakukan akreditasi Pada tahun 2023 dan tidak bisa di alihkan ke Puskesmas lain	untuk Puskesmas Lokus karena sudah ditetapkan dalam permenkes tentang penggunaan Dana DAK NF tahun 2024 2.Meningkatkan integrasi dan koordinasi dengan lintas sektor terkait pelaksanaan ILP di tingkat Puskesmas dan Pustu	

No	Program Kegiatan	Kebijakan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
									<p>2. Belum semua puskesmas yang melakukan transformasi layanan ke Integrasi Layanan Primer (ILP) yang berbasis siklus hidup, baru 6 Puskesmas (40%) dari jumlah Puskesmas yang ada di Kabupaten Dharmasraya</p> <p>3. Belum semua PUSTU di kabupaten</p>	<p>3. Sosialisasi dan edukasi yang intensif terkait ILP kepada masyarakat dengan melibatkan penanggung jawab Pustu, Lintas sektor dan melakukan skrining di tingkat Puskesmas, Pustu, dan lapangan (kunjungan Rumah).</p>	

No	Program Kegiatan	Kebijakan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
									Dharmasraya yang melakukan ILP, karena hanya Pustu dengan puskesmas Lokus ILP yang dilakukan orientasi tentang layanan ILP		
17.	Kegiatan Pelaksanaan Sehat Dalam Angka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kab/Kota										
61)	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih Dan Sehat		100%	100%	100%	110.520.000	88.433.000	80,02 %	1. Semua kegiatan terlaksana namun tidak semua anggaran dapat direalisasikan, sehingga sisa anggaran merupakan silva positif	1. Penguatan Forum Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) Kabupaten Dharmasraya	

No	Program Kegiatan	Kebijakan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
									2. Pelaksanaan Penggerakan Masyarakat untuk hidup sehat perlu dimaksimalkan.	2. Menerapkan kebijakan GERMAS menjadi 90% melalui Gerakan Aksi Bergizi, Gerakan Bumil Sehat, dan Gerakan Cegah Stunting 3. Melibatkan Mitra Potensial dan Lintas Sektor terkait untuk Penggerakan Masyarakat	

No	Program Kegiatan	Kebijakan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
										t Hidup Sehat	
Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota											
RSUD SUNGAI RUMBAI											
62)	Sub Kegiatan Operasional Pelayanan RSUD Sungai Rumbai		100%	100%	100%	4.410.000.000	3.610.804.328	81,88 %	Masalah Tidak ada		
UPT LABKESDA											
63)	Sub Kegiatan : Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1.Peraturan Bupati Dharmasraya No 24 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Dharmasraya No 8 tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan pemerintah Kabupaten	100 %	100%	100 %	302.392.000	258.693.915	85.54 %	Tidak tercapainya realisasi pencairan alokasi anggaran kegiana ini, dikarenakan pada kegiatan pembinaan mutu dan akreditasi serta pembinaan teknis standar laboratorium, yang menghadirkan	Memaksimalkan lagi dalam membuat anggaran perencanaan suatu kegiatan, dengan memiliki data narasumber ahli yang berada di regional Sumatera atau Sumatera Barat	

No	Program Kegiatan	Kebijakan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
		Dharmasraya tahun anggaran 2024 2.Permenkes RI No 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, Dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi.							narasumber ahli, yang saat perencanaan akan berasal dari luar provinsi Sumatera barat, sehingga anggaran yang disediakan untuk biaya tiket pesawat, akomodasi, transport lokal tidak terpakai, dikarenakan 3 dari 4 narasumber berasal dari daerah Sumatera Barat.	Khususnya, sehingga dalam implementasi kegiatan dapat lebih terukur kebutuhan anggarannya.	

3. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program Yang Sudah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja.

Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Telah Dapat Direalisasikan Melalui Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Sebagai Berikut:

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA		
1.	Kegiatan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1)	Sub Kegiatan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	Output Kegiatan ini	Telah dibayarkannya gaji ASN sebanyak 1095 orang
	Kegiatan yang dilaksanakan	Pembayaran gaji ASN Dinas Kesehatan
2)	Sub Kegiatan	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
	Output Kegiatan ini	Terlaksananya penatausahaan keuangan di UPT Dinas Kesehatan
	Kegiatan yang dilaksanakan	Mengadakan Bimbingan Teknis bidang keuangan ke Puskesmas-Puskesmas di lingkup Dinas Kesehatan
3)	Sub Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
	Output Kegiatan ini	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Dinas Kesehatan
	Kegiatan yang dilaksanakan	Koordinasi untuk menyusun laporan keuangan
2.	Kegiatan	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
4)	Sub Kegiatan	Pembahasan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
	Output Kegiatan ini	Telah dilaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap BMD Dinas Kesehatan
	Kegiatan yang dilaksanakan	Rekonsiliasi Data BMD Dinas Kesehatan dengan Penyimpan Barang di Puskesmas dan RSUD
5)	Sub Kegiatan	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
	Output Kegiatan ini	Terlaksananya penatausahaan BMD di Dinas Kesehatan
	Kegiatan yang dilaksanakan	Melaksanakan Bimtek ke Puskesmas dan RSUD di lingkup Dinas Kesehatan
3.	Kegiatan	Administrasi Umum Perangkata Daerah
6)	Sub Kegiatan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	Output Kegiatan ini	Tersedianya komponen listrik di Dinas Kesehatan
	Kegiatan yang dilaksanakan	Pembelian lampu, kabel, senter, isolasi, dan alat listrik lainnya
7)	Sub Kegiatan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	Output Kegiatan ini	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor di Dinas Kesehatan
	Kegiatan yang dilaksanakan	Pembelian alat tulis kantor, bahan komputer, alat pemancar, dan kamera CCTV
8)	Sub Kegiatan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
	Output Kegiatan ini	Tersedianya alat kebersihan kantor Dinas Kesehatan
	Kegiatan yang dilaksanakan	Pembelian sapu, kemoceng, cairan pembersih, dan sebagainya
9)	Sub Kegiatan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	Output Kegiatan ini	Tersedianya bahan logistik kantor Dinas Kesehatan
	Kegiatan yang dilaksanakan	Pembelian makan dan minum rapat dan makan dan minum tamu Dinas Kesehatan
10)	Sub Kegiatan	PenyediaanBarangCetakandanPenggandaan
	Output Kegiatan ini	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan di Dinas Kesehatan
	Kegiatan yang dilaksanakan	Pengadaan barang cetakan seperti map, amplop, penggandaan, dan penjilidan
11)	Sub Kegiatan	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	Output Kegiatan ini	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi Dinas Kesehatan

	Kegiatan yang dilaksanakan	Perjalanan dinas ke luar daerah baik luar kabupaten maupun luar provinsi dalam rangka koordinasi dan konsultasi
4.	Kegiatan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
12)	Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	Output Kegiatan ini	Tersedianya materai untuk keperluan Dinas Kesehatan
	Kegiatan yang dilaksanakan	Pembelian materai 10.000 sebanyak 400 lembar
13)	Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
	Output Kegiatan ini	Tersedianya jasa komunikasi, air, dan listrik di Dinas Kesehatan
	Kegiatan yang dilaksanakan	Pembayaran tagihan internet, air, dan listrik
14)	Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	Output Kegiatan ini	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor
	Kegiatan yang dilaksanakan	Pembayaran pemeliharaan peralatan kantor seperti pendingin ruangan, laptop/komputer, dan printer
15)	Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	Output Kegiatan ini	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor di Dinas Kesehatan berupa Tenaga Non ASN
	Kegiatan yang dilaksanakan	Pembayaran honor non ASN diantaranya: tenaga kesehatan, administrasi, sopir, penjaga kantor, dan lain-lain yang ada di lingkup Dinas Kesehatan
5.	Kegiatan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
16)	Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	Output Kegiatan ini	Tersedianya jasa pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas jabatan sebanyak 1 unit
	Kegiatan yang dilaksanakan	Pembayaran pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas jabatan
17)	Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan
	Output Kegiatan ini	Tersedianya jasa pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas operasional lapangan sebanyak 10 unit
	Kegiatan yang dilaksanakan	Pembayaran jasa pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas operasional lapangan
18)	Sub Kegiatan	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
	Output Kegiatan ini	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor Dinas Kesehatan
	Kegiatan yang dilaksanakan	Penggantian atap gedung kantor Dinas Kesehatan yang bocor
6.	Kegiatan	Pelayanan Penunjang BLUD
19)	Sub Kegiatan	Pelayanan Penunjang BLUD UPT Puskesmas
	Output Kegiatan ini	Terlaksananya operasional pelayanan penunjang BLUD UPT Puskesmas untuk penunjang kegiatan dan sarana prasarana sesuai kebutuhan di 15 UPT Puskesmas.
	Kegiatan yang dilaksanakan	Terlaksananya kegiatan program-program di UPT Puskesmas
20)	Sub Kegiatan	Pelayanan Dan Penunjang Pelayanan BLUD UPT RSUD Sungai Rumbai
	Output Kegiatan ini	Terpenuhinya Operasional BLUD UPT RSUD Sungai Rumbai
	Kegiatan yang dilaksanakan	Tercapainya Belanja Operasional BLUD UPT Sungai Rumbai
21)	Sub. Kegiatan	Pelayanan dan Penunjang BLUD UPT LABKESDA
	Output Kegiatan ini	Terlaksananya kegiatan belanja yang bersumber dari pendapatan Badan Layanan umum daerah UPTD Laboratorium kesehatan daerah, sebagian besarnya untuk pemenuhan pengadaan Bahan medis habis pakai (BMHP) laboratorium yang merupakan belanja barang dan jasa serta belanja Pegawai di UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah.
	Kegiatan yang dilaksanakan	Pelayanan fasilitas kesehatan rujukan yang berfokus pada pelayanan pemeriksaan laboratorium, yang meliputi kegiatan belanja pegawai berupa penyediaan jasa pelayanan kesehatan dan

		belanja barang dan jasa berupa penyediaan bahan medis habis pakai (bahan reagen pemeriksaan dan bahan kimia)
II.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN (UKP) DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (UKM)	
7.	Kegiatan	Penyediaan fasilitas pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
22)	Sub Kegiatan	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan
	Output Sub Kegiatan ini	Pembangunan rumah dinas tenaga kesehatan di Puskesmas sungai rumbai dan Puskesmas sitiung IV.
	Kegiatan yang dilaksanakan	Terlaksananya Pembangunan rumah dinas tenaga kesehatan di Puskesmas sungai rumbai dan Puskesmas sitiung IV.
23)	Sub Kegiatan	Pengembangan Puskesmas
	Output Sub Kegiatan ini	Terlaksananya Pengadaan 7 ambulance transport dan 3 ambulance puskel, terlaksananya pembangunan UGD Puskesmas sitiung II dan Gunung Medan, terlaksananya pembangunan 1 instalasi air bersih di sungai limau , terlaksananya 1 pembangunan IPAL di sitiung IV serta terlaksananya 6 Pekerjaan Pokir yaitu pemasangan paving blok puskesmas sungai rumbai, tiumang, poskesri alahan nan tigo, rehap posyandu mawar putih, rehap ringan puskesmas sialang dan lanjutan pembangunan poskesri kuat sakato
	Kegiatan yang dilaksanakan	Terlaksananya pengadaan fisik untuk kegiatan pengembangan Puskesmas
24)	Sub Kegiatan	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
	Output Sub Kegiatan ini	Tersedianya 1 Unit Kursi Gigi untuk pelayanan kesehatan gigi dan 15 Temperatur Logger (Alat Pengatur Suhu Vaksin) di 15 Puskesmas
	Kegiatan yang dilaksanakan	Pengadaan Alat Kesehatan /Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
25)	Sub Kegiatan	Pengadaan Pemeliharaan Alat Kalibrasi
	Output Sub Kegiatan ini	Telah dilakukan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi sebanyak 491 Alat Kesehatan
	Kegiatan yang dilaksanakan	Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center Sebanyak 491 Alat Kesehatan
26)	Sub Kegiatan	Pengadaan obat bahan habis pakai Baham Medis Habis Pakai Vaksin Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan
	Output Sub Kegiatan ini	Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman Difasilitas Kesehatan
	Kegiatan yang dilaksanakan	Penyediaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman Difasilitas Kesehatan
27)	Sub Kegiatan	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan.
	Output Sub Kegiatan ini	Semua Puskemas dengan Ketersediaan Obat, Vaksin dan BMHP 80%
	Kegiatan yang dilaksanakan	Distribusi obat, vaksin dan BMHP dari UPTD. IGFK ke Puskesmas
8.	Kegiatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
28)	Sub Kegiatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
	Output Sub Kegiatan ini	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Dari jumlah sasaran ibu hamil sebanyak 3473 orang yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar 3043 orang, persentase pencapaian pelayanan kesehatan pada ibu hamil 87.6 %.
	Kegiatan yang dilaksanakan	1. Pendampingan tim ahli FKTP ke Puskesmas 2. Rapat pembentukan evaluasi ANC

		3. On The Job Training kasus kegawatdaruratan ibu dan anak bagi Dokter, Bidan, dan Perawat FKTP Kke RS. 4. Pelatihan Pelayanan ANC, Persalinan, Nifas dan SHK bagi Bidan.
29)	Sub Kegiatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
	Output Sub Kegiatan ini	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, dari sasaran ibu bersalin 3473 orang, yang mendapatkan pelayanan kesehatan 3233 orang, capaian pelayanan kesehatan ibu bersalin 93,08%
	Kegiatan yang dilaksanakan	Pengkajian dan pembelajaran AMP 4 kali setahun
30)	Sub Kegiatan	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
	Output Sub Kegiatan ini	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan sesuai standar, dari sasaran bayi baru lahir 3223 orang yang dilayani 3159 orang, capaian pelayanan kesehatan bayi baru lahir 98.01%
	Kegiatan yang dilaksanakan	1. Monitoring dan Evaluasi Skrining Hipotiroid kongenital (SHK) 2. Monitoring dan evaluasi program Kesehatan Ibu dan Anak
31)	Sub Kegiatan	Pelayanan Kesehatan pada Balita
	Output Sub Kegiatan ini	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dari jumlah sasaran balita sebanyak 14.999 orang, yang dilayani kesehatan sesuai standar 15.777 orang (105,2 %) ini ditemukan terjadi peningkatan sekitar 778 orang balita yang tidak terdata sebagai sasaran sehingga capain melebihi target.
	Kegiatan yang dilaksanakan	1. Pertemuan evaluasi intervensi spesifik stunting 2. Supervisi layanan program kesehatan ibu dan anak dalam pengelolaan posyandu 3. Pertemuan SDIDTK
32)	Sub Kegiatan	Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar
	Output Kegiatan ini	Jumlah usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan sesuai standar dari jumlah sasaran usia pendidikan dasar sebanyak 39.274 orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan 37.748 orang, capaian pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar 96.1%.
	Kegiatan yang dilaksanakan	1. Melakukan kegiatan pertemuan penguatan stratifikasi UKS/M 2. Monitoring dan evaluasi program kesehatan keluarga dan gizi masyarakat
33)	Sub Kegiatan	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif
	Output Kegiatan ini	Jumlah usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dari sasaran usia produktif 159.435 orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan 137.838 orang. Capaian pelayanan kesehatan reproduksi 86.4%
	Kegiatan yang dilaksanakan	1. Pertemuan lintas sektor kesehatan reproduksi catin dan KB 2. Pertemuan lintas sektor dan monev kesehatan reproduksi calon pengantin
34)	Sub Kegiatan	Pelayanan Kesehatan Pada Usia lanjut
	Output Kegiatan ini	Jumlah usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, Dari sasaran Lansia 17551 orang, yang di layani kesehatan 16798 orang, Capaian Kesehatan pada usia lanjut 95.7%.
	Kegiatan yang dilaksanakan	Workshop peduli kesehatan lansia
35)	Sub Kegiatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
	Output Kegiatan ini	22.039 penderita Hipertensi terlayani sesuai dengan standar (99,58%)
	Kegiatan yang dilaksanakan	1) Pendataan penderita hipertensi menurut wilayah kerja FKTP 2) Melakukan skrining faktor risiko hipertensi untuk seluruh pasien di FKTP 3) Melakukan pelayanan kesehatan sesuai standar, berupa edukasi

		<ol style="list-style-type: none"> 4) tentang diet makanan dan aktivitas fisik, serta terapi farmakologi 5) Melakukan rujukan ke FKRTL untuk pencegahan komplikasi 6) Pelatihan teknis pelayanan kesehatan tentang hipertensi bagi tenaga kesehatan, termasuk pelatihan surveilans faktor risiko. 7) Hipertensi berbasis web di Aplikasi ASIK 8) Penyediaan peralatan kesehatan hipertensi 9) Penyediaan obat hipertensi 10) Pencatatan dan pelaporan. 11) Melakukan Pertemuan Workshop Pengendalian PTM 12) Melakukan Rapat Koordinasi Program Pencegahan dan Pengendalian PTM. 13) Monitoring dan evaluasi.
36)	Sub Kegiatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
	Output Kegiatan ini	2,419 Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (99,10%)
	Kegiatan yang dilaksanakan	<ol style="list-style-type: none"> a) Pelayanan kesehatan diberikan kepada penyandang DM di FKTP sesuai standar meliputi 4 (empat) pilar penatalaksanaan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1) Edukasi 2) Aktifitas fisik 3) Terapi nutrisi medis 4) Intervensi farmakologis b) Setiap penyandang DM yang mendapatkan pelayanan sesuai standar termasuk pemeriksaan HbA1C. c) Melakukan pendataan penderita DM menurut wilayah kerja FKTP d) Melakukan skrining faktor risiko DM untuk seluruh pasien di FKTP. e) Melakukan rujukan ke FKRTL untuk pencegahan komplikasi. f) Pelatihan teknis pelayanan kesehatan tentang DM bagi tenaga kesehatan, termasuk pelatihan surveilans DM berbasis web. g) Hipertensi berbasis web di Aplikasi ASIK a) Penyediaan peralatan kesehatan DM, termasuk HbA1C. b) Penyediaan obat DM. c) Pencatatan dan pelaporan. d) Melakukan Pertemuan Workshop Pengendalian PTM e) Melakukan Rapat Koordinasi Program Pencegahan dan Pengendalian PTM. f) Monitoring dan evaluasi.
37)	Sub Kegiatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat
	Output Kegiatan ini	447 penderita ODGJ Berat terlayani sesuai dengan standar (100%)
	Kegiatan yang dilaksanakan	<p>Pelayanan kesehatan jiwa pada ODGJ berat meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Edukasi dan evaluasi tentang: tanda dan gejala gangguan jiwa, kepatuhan minum obat dan informasi lain terkait obat, mencegah tindakan pemasungan, kebersihan diri, sosialisasi, kegiatan rumah tangga dan aktivitas bekerja sederhana, dan/atau. 2) Tindakan kebersihan diri ODGJ berat 3) Pencatatan dan pelaporan hasil kegiatan diinput dalam aplikasi SIMKESWA. 4) Kunjungan langsung pada pasien dan Keluarga ODGJ Berat untuk memantau pengobatan dan melakukan pemeriksaan. 5) Pertemuan Orientasi Upaya Promotif dan Preventif Kesehatan Jiwa

		6) Bimbingan Teknis kepada Pengelola Puskesmas dalam pelaksanaan Program ODGJ Berat. 7) Meningkatkan capaian target SPM.
38)	Sub Kegiatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Tuberkulosis
	Output Kegiatan ini	3.649 penderita TBC terlayani sesuai dengan standar (93,23%)
	Kegiatan yang dilaksanakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penemuan kasus kontak erat/ serumah. 2. Penemuan kasus secara pasif di faskes (surveilans batuk, skrining TB pada lanjut usia, balita dengan malnutrisi, penderita Diabetes Melitus (DM), orang dengan HIV (ODHIV), dan perokok. 3. Edukasi dan motivasi agar pasien mau untuk kembali melanjutkan pengobatan. 4. Penemuan kasus melalui kolaborasi layanan (Posyandu, SDIDTK, Posbindu dan program kesehatan lainnya dan skiring pada populasi berisiko Kegiatan kunjungan ke tempat-tempat khusus berisiko. Untuk pelaksanaan screening TBC. 5. Pencatatan dan pelaporan hasil kegiatan diinput dalam aplikasi SITB. 6. Kunjungan langsung pada pasien TBC untuk memantau pengobatan, melakukan pemeriksaan terduga kasus ILTB, melakukan pemberian TPT. 7. Pertemuan Validasi Data Program TBC 8. Rapat Koordinasi Lintas Sektor Program TBC 9. Pertemuan Lintas Sektor Dalam Rangka Mendorong dan Memperkuat Komitmen. 10. Menindaklanjuti alert dan reminder di SITB. 11. Meningkatkan capaian target SPM.
39)	Sub Kegiatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV
	Output Kegiatan ini	4.155 penderita HIV terlayani sesuai dengan standar (79,61%)
	Kegiatan yang dilaksanakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Upaya pencegahan pada orang yang memiliki risiko terinfeksi HIV. 2. Pemeriksaan HIV ditawarkan secara aktif oleh petugas kesehatan bagi orang yang berisiko dimulai dengan pemberian informasi terkait HIV-AIDS pemeriksaan HIV menggunakan tes cepat HIV dengan menggunakan alat tes sesuai standar nasional yang telah ditetapkan. 3. orang dengan hasil pemeriksaan HIV positif harus dirujuk ke fasilitas yang mampu menangani untuk mendapatkan pengobatan ARV dan konseling tentang HIV dan AIDS bagi orang dengan HIV (ODHA) dan pasangannya 4. Mengevaluasi capaian program HIV/AIDS. 5. Memetakan populasi kunci yang berisiko tertular HIV/AIDS. 6. Meningkatkan kerja sama lintas sektor dalam penanganan HIV/AIDS. 7. Meningkatkan kapasitas pengelola program dan kader dalam penemuan dan pengobatan pasien HIV/AIDS.
40)	Sub Kegiatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
	Output Kegiatan ini	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telah dilakukan kegiatan Pertemuan Koordinasi/Sosialisasi Penguatan Posyandu dan UKBM Lainnya. Kegiatan ini bertujuan untuk penguatan Posyandu dan UKBM lainnya dengan peserta sebanyak 67 orang. 2. Telah dilakukan kegiatan Advokasi Pembentukan Pokjnal Posyandu/terkait pelaksanaan peran Pokjnal Posyandu kepada LS. Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh dukungan dari Stakeholders terkait, dengan peserta sebanyak 67 orang. 3. Telah dilakukan kegiatan Bimbingan Tekhnis. Kegiatan ini

		bertujuan untuk memberikan pembinaan, bimbingan dan memonitoring pelaksanaan kegiatan Program Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat di Puskesmas. Dengan sasaran pelaksanaan kegiatan sebanyak 15 Puskesmas se-kabupaten Dharmasraya.
	Kegiatan yang dilaksanakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kegiatan Pertemuan Koordinasi/Sosialisasi Penguatan Posyandu dan UKBM Lainnya. Kegiatan ini disamping untuk penguatan Posyandu dan UKBM lainnya juga bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya kesehatan dan pelaku serta pengambil kebijakan yang berkaitan dengan pelaksanaan Posyandu Terintegrasi. 2. Pelaksanaan kegiatan Advokasi Pembentukan Pokjanal Posyandu/terkait pelaksanaan peran Pokjanal Posyandu kepada LS. Kegiatan ini disamping untuk memperoleh dukungan dari Stakeholders terkait juga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan layanan kesehatan di masyarakat serta meningkatkan pembinaan teknis dan kelembagaan dari Pokjanal tingkat Kabupaten, Pokjanal tingkat Kecamatan dan Pokja Posyandu Desa/Kelurahan/Nagari dalam pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan Posyandu Terintegrasi. 3. Pelaksanaan kegiatan Bimbingan Tekhnis. yang bertujuan untuk memberikan pembinaan, bimbingan dan memonitoring pelaksanaan kegiatan Program Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat di Puskesmas. Bimtek dilakukan terhadap Tenaga Pengelola Program Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat di Puskesmas.
41)	Sub Kegiatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olah Raga
	Output Kegiatan ini	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan derajat kesehatan melalui pembinaan kebugaran jasmani dan status kesehatan pada sasaran kebugaran jasmani anak sekolah, kesehatan pekerja, dan jemaah haji serta mengidentifikasi potensi masalah kesehatan yang perlu ditangani di wilayah kerja Puskesmas 2. Mengetahui tingkat kebugaran jasmani dan memberikan rekomendasi aktivitas fisik/latihan fisik baik benar terukur teratur pada sasaran
	Kegiatan yang dilaksanakan	<p>Melakukan pengukuran kebugaran pada calon jemaah haji, ASN dan anak sekolah. Kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengukuran Kebugaran Calon Jemaah Haji sebanyak 280 orang dengan hasil pengukuran <ol style="list-style-type: none"> a. Baik sekali 2 orang b. Baik 50 orang c. Cukup 100 orang d. Kurang 78 orang e. Kurang sekali 0 orang 2. Pengukuran Kebugaran Anak Sekolah sebanyak 358 orang dengan hasil pengukuran <ol style="list-style-type: none"> a. Baik sekali 40 orang b. Baik 104 orang c. Cukup 72 orang d. Kurang 70 orang e. Kurang sekali 61 orang f. Gagal 11 orang 3. Pengukuran Kebugaran ASN sebanyak 204 orang Dengan hasil pengukuran <ol style="list-style-type: none"> a. Baik sekali 93 orang b. Baik 26 orang c. Cukup 84 orang d. Kurang 1 orang e. Kurang sekali 0 orang

42)	Sub Kegiatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
	Output Kegiatan ini	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan Kualitas Air Minum Rumah tangga sebanyak 15 RT dengan 420 jumlah sampel yang dilaksanakan pada 15 puskesmas. 2. Pemeriksaan Kualitas Air Minum Pada Tempat Fasilitas Umum (TFU) sebanyak 24 sarana dengan jumlah 336 sampel yang dilaksanakan pada 15 Puskesmas. 3. Pemeriksaan Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) sebanyak 6 sarana TPP dengan jumlah 84 sampel yang dilaksanakan pada 15 puskesmas.
	Kegiatan yang dilaksanakan	<p>Mengidentifikasi potensi risiko kesehatan terhadap Tempat dan Fasilitas Umum (TFU), Tempat Pengelolaan Pangan (TPP), sarana air minum, dan fasilitas pelayanan kesehatan untuk mencegah risiko penularan penyakit dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Inspeksi kesehatan lingkungan merupakan kegiatan pemeriksaan dan pengamatan secara langsung terhadap media lingkungan dalam rangka pengawasan berdasarkan standar, norma, dan baku mutu yang berlaku untuk meningkatkan kualitas lingkungan yang sehat. Inspeksi kesehatan lingkungan dilakukan dengan cara/metode yaitu pengamatan fisik media lingkungan dan pengukuran media lingkungan di tempat.</p>
43)	Sub Kegiatan	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
	Output Kegiatan ini	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telah dilakukan kegiatan Pelatihan Kompetensi / Keterampilan Dasar Kader Posyandu bagi Tenaga Kesehatan sebanyak 30 orang peserta yang berasal dari Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Puskesmas Pembantu di Kabupaten Dharmasraya. Sasaran kegiatan adalah Tenaga Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Pengelola Program Promosi dan PM serta Petugas Pustu. 2. Telah dilakukan kegiatan Pelatihan Public Speaking bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya khususnya Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya. Dengan peserta sebanyak 25 orang.
	Kegiatan yang dilaksanakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kegiatan Pelatihan Kompetensi/Keterampilan Dasar Kader Posyandu bagi Tenaga Kesehatan sebanyak 30 orang peserta yang berasal dari Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Puskesmas Pembantu di Kabupaten Dharmasraya. Pelatihan dilaksanakan selama 5 (Lima) hari efektif tanggal 16 s/d 20 September 2024 setara dengan 32 jam pelajaran (JPL). 2. Pelaksanaan kegiatan Pelatihan Public Speaking bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya khususnya Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya bertujuan untuk : <ol style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan kemampuan dalam menyampaikan pesan, mempengaruhi pendapat dan sikap audiens, serta menginspirasi atau menghibur audiens. b. Memberdayakan dan mengembangkan kemampuan berbicara di depan umum dengan penuh percaya diri dan profesional. Sebagai Tenaga Kesehatan harus memiliki kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif.
44)	Sub Kegiatan	Pengelolaan Surveilans Kesehatan
	Output Kegiatan ini	<ol style="list-style-type: none"> 1. 100% kelengkapan pelaporan SKDR 2. 98% Ketepatan pelaporan SKDR 3. 85% Verifikasi Alert <24 jam
	Kegiatan yang dilaksanakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinkes Melakukan Pembinaan Petugas Surveilans tingkat Fasyankes (Puskesmas dan RSUD) sehingga semua petugas sudah mendapatkan OJT SKDR untuk melakukan pelaporan SKDR , kegiatan ini dilakukan di 15 Wilayah Puskesmas se Kab

		<p>Dharmasraya.</p> <p>2. Dinkes Melakukan Verifikasi Alert Kasus berpotensi KLB <24 jam, namun dengan sudah dilakukan OJT kepada Puskesmas maka Puskesmas harus melakukan Verifikasi Alert < 24 jam, dinkes melakukan notifikasi alert melalui aplikasi SKDR, Grup WA dan Telepone</p> <p>3. Dinkes melakukan Pengiriman Sampel PD3I ke tingkat Provinsi, sampel PD3I (AFP, Pertusis, Difteri, Campak, Rubella dan PD3I lainnya) yang dikirimkan dari Puskesmas akan di verifikasi di Dinkes lalu dikirimkan melalui pihak ke 3 (travel).</p> <p>4. Dinkes Melakukan Penyelidikan Epidemiologi kasus PD3I yang ditemukan di lapangan, sepertinya suspek Pertusis, cluster Varicella, suspek Difteri, AFP dan kasus PD3I Lainnya.</p> <p>5. Dinkes melakukan HRR (Hospital Record Review) pada Surveilans Aktif Rumah Sakit dan Klinik di wilayah Puskesmas.</p> <p>6. Dinkes Melakukan Monev Pelaksanaan Program Surveilans dengan melibatkan pengambil kebijakan sehingga masing-masing Puskesmas mengetahui Rapor Kinerjanya.</p>
45)	Sub Kegiatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Napza
	Output Kegiatan ini	Kasus penyalahgunaan Napza 0, hasil skrining dari orang yang beresiko terhadap penggunaan Napza ada sebanyak 314 orang dengan hasil resiko rendah 209 orang, resiko sedang 89 orang, dan resiko tinggi 16 orang.
	Kegiatan yang dilaksanakan	<p>Kegiatan Pelayanan Kesehatan pada masyarakat dan remaja yang beresiko terhadap Penyalahgunaan Napza adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi pada sasaran terkait bahaya Napza. 2. Pelayanan deteksi dini penyalahgunaan Napza dengan menggunakan formulir ASSIST. 3. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petugas/programer Keswa Napza di Puskesmas. 4. Memberikan fasilitasi pelayanan kesehatan melalui IPWL (Institusi Penerima Wajib Lapo). IPWL adalah lembaga yang menyelenggarakan program rehabilitasi bagi pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan narkoba (NAPZA). 5. Mengadakan Pelatihan Kesehatan Jiwa Terpadu pada Pengelola Kesehatan Jiwa Napza di Puskesmas. 6. Melaksanakan Pertemuan Orientasi Upaya Promotif dan Preventif Kesehatan Jiwa pada Petugas. 7. Melakukan Bimbingan Teknis terhadap pelaksanaan Program Kesehatan Jiwa Napza pada pengelola Puskesmas. 8. Monitoring dan Evaluasi
46)	Sub Kegiatan	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular Dan Tidak Menular
	Output Kegiatan ini	<p>4 Dokumen :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan cakupan pelayanan kasus DBD (100%) 2. Laporan cakupan pelayanan kasus Malaria (100%) 3. Laporan cakupan pelayanan kasus GHPR (100%) 4. Laporan cakupan POPM Filariasis dan Kecacingan (95%)
	Kegiatan yang dilaksanakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Survei vektor malaria, DBD dan reservoir leptospirosis merupakan kegiatan survei ke lapangan untuk pemeriksaan jentik Anopheles spp, pemeriksaan jentik Aedes sp, serta pemasangan perangkap tikus untuk mengetahui kepadatan tikus di suatu wilayah. 2. Pengendalian vektor (pengasapan/fogging, larvasidasi DBD, larvasidasi malaria dan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN). larvasidasi malaria merupakan kegiatan intervensi jentik Anopheles spp dengan menggunakan larvasida, melakukan pengasapan/fogging dan larvasidasi DBD, serta

		<p>kegiatan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) 3M Plus di masyarakat.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Pemberdayaan masyarakat/kader dalam melakukan pencegahan dan pengendalian penyakit menular dengan melibatkan pemerintah desa, masyarakat/kader, termasuk dalam pemberdayaan kader/relawan surveilans berbasis masyarakat (SBM). 4. Dinkes Melakukan Rapat Kerja Kesehatan Daerah Bidang P2P dengan melibatkan lintas Program dengan tujuan untuk penguatan dan tatalaksana penyakit Menular dan Tidak Menular. 5. Pengumpulan data epidemiologi dari berbagai lokasi untuk mengidentifikasi pola dan tren penyakit, serta menganalisis faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penyebaran penyakit menular.
47)	Sub Kegiatan	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
	Output Kegiatan ini	Meningkatnya status kesehatan masyarakat
	Kegiatan yang dilaksanakan	Pembayaran premi kepesertaan PBPU dan BP tahun 2024 serta bimbingan teknis terhadap pengelola program di puskesmas
48)	Sub Kegiatan	Operasional Pelayanan Puskesmas
	Output Kegiatan ini	Terlaksananya anggaran untuk kegiatan Puskesmas dan hasil pemanfaatan dana BOK untuk kegiatan operasional Puskesmas dan jaringannya.
	Kegiatan yang dilaksanakan	Melaksanakan kegiatan program-program kesehatan sesuai dengan juknis pelaksanaan anggaran DAK Non Fisik Tahun 2024.
49)	Sub Kegiatan	Operasional Pelayanan Kesehatan Lainnya
	Output Kegiatan ini	Operasional pelayanan UPTD. Instalasi Gudang Farmasi Kesehatan (IGFK) Kab. Dharmasraya
	Kegiatan yang dilaksanakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Operasional pelayanan UPTD. Instalasi Gudang Farmasi Kesehatan (IGFK) Kab. Dharmasraya 2. Penjemputan Vaksin, obat program dan buffer stok ke Dinas Kesehatan Propinsi 3. Pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan obat ke puskesmas
50)	Sub Kegiatan	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota
	Output Kegiatan ini	Terlaksananya Survey Akreditasi Puskesmas Sitiung IV dengan hasil Utama. Survei sudah dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi darah, Tempat Paraktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi;
	Kegiatan yang dilaksanakan	Survey dan Pembinaan Akreditasi Puskesmas Sitiung IV
51)	Sub Kegiatan	Investigasi awal kejadian tidak diharapkan (kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat masal)
	Output Kegiatan ini	Terkonfirmasi investigasi KIPI 100%
	Kegiatan yang dilaksanakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinkes melakukan Investigasi KIPI pada wilayah Puskesmas yang terdapat kasus KIPI 2. Dinkes melakukan pembinaan petugas Imunisasi dalam penanganan KIPI dan Pelaporan by Aplikasi 3. Dinkes melakukan Monev pada petugas Korim dalam tatalaksana KIPI
52)	Sub Kegiatan	Pelaksanaan kewaspadaan dini dan respon wabah
	Output Kegiatan ini	<ol style="list-style-type: none"> 1. 56,7% Bayi yang mendapatkan layanan imunisasi Dasar Lengkap (2.509 bayi) 2. 51,8% Bayi mendapatkan layanan Imunisasi dengan antigen Baru (2.294 bayi) 3. 45,8% balita yang mendapatkan imunisasi lanjutan (2.077

		baduta) 4. 67,8% Ibu hamil yang sudah memiliki status t2+ (3.394 ibu hamil) 5. 90,1% anak usia 0-7 tahun yang mendapatkan Imunisasi PIN Polio (30.918 anak) 6. 75,17% anak sekolah Dasar yang mendapatkan imunisasi lanjutan (3.273 anak)
	Kegiatan yang dilaksanakan	1. Dinkes melakukan penguatan orientasi Program Surveilans dan Imunisasi petugas dan Kader di tingkat Puskesmas 2. Dinkes melakukan Rapat Koordinasi Penanggulangan KLB yaitu PIN Polio dan BIAS tingkat Kabupaten yang di pimpn oleh Sekda dan di hadiri oleh Lintas Sektor terkait dengan tujuan untuk mendapatkan dukungan pelaksanaan PIN polio dan BIAS. 3. Dinkes Melaksanakan Monitoring dan Pendampingan Pelaksanaan Imunisasi, PIN Polio dan BIAS. 4. Dinkes melaksanakan RCA (Rapid Convenience Assesment) PIN Polio pada 5 Wilayah Puskesmas 5. Dinkes melakukan Koordinasi, Advokasi, Sosialisasi dan Pencananagan Inovasi SUMBAR RANCAK pada Program Imunisasi di Wilayah Kec Koto Salak 6. Dinkes Melakukan Rapat Konsolidasi Teknis Bidang (Rakontek) Bidang P2P dengan melibatkan lintas Program dengan tujuan untuk penguatan dan tatalaksana penyakit Menular dan Tidak Menular. 7. Dinkes melakukan Validasi dan Utilisasi pelaporan Program Surveilans dan Imunisasi dengan tujuan agar tidak ada selisih pada pelaporan dari Puskesmas dan Dinkes.
53)	Sub Kegiatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria
	Output Kegiatan ini	Pengadaan BMHP Pemeriksaan Malaria (95,25%)
	Kegiatan yang dilaksanakan	Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai pemeriksaan malaria untuk menunjang pelaksanaan pelayanan program malaria di UPT Puskesmas.
9.	Kegiatan	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi
54)	Sub Kegiatan	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
	Output Kegiatan ini	Terkelolanya sistem informasi kesehatan untuk menunjang kegiatan pekerjaan di lingkungan Dinas Kesehatan Kegiatan yang dilaksanakan yaitu membuat profil Dinas Kesehatan.
	Kegiatan yang dilaksanakan	Bimtek dan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan membuat laporan profil Dinas Kesehatan.
10.	Kegiatan	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kab/Kota.
55)	Sub Kegiatan	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan
	Output Kegiatan ini	Terlaksananya pemantauan mutu puskesmas pasca akreditasi melalui bimtek dan laporan online
	Kegiatan yang dilaksanakan	Pemantauan Mutu Puskesmas Pasca Akreditasi melalui bimtek dan pengisian laporan INM online.
III.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	
11.	Kegiatan	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
56)	Sub Kegiatan	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan
	Output Kegiatan ini	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan
	Kegiatan yang dilaksanakan	Dilaksanakannya kegiatan: pemutakhiran data SDM, pembinaan rencana kebutuhan dan ketersediaan obat, pemantauan dan

		evaluasi Labkesmas, pembinaan kepegawaian ke Puskesmas, dan sosialisasi aturan kepegawaian terhadap tenaga PPPK.
12.	Kegiatan	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
57)	Sub Kegiatan	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	Output Kegiatan ini	Meningkatnya mutu tenaga kesehatan di fasyankes melalui pelatihan terakreditasi di BKOM Pelkes Padang yang diikuti oleh sedikitnya 50 orang tenaga kesehatan
	Kegiatan yang dilaksanakan	Pelatihan yang dilakukan yaitu: Upaya berhenti merokok, kesehatan jiwa, integrasi layanan primer, limbah fasyankes, dan pelatihan bagi petugas TBC.
IV.	PROGRAM KESEDIAAN FARMASI ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	
13.	Kegiatan	Pemberian Izin Apotik, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Otikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
58)	Sub Kegiatan	Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotik
	Output Kegiatan ini	telah dilaksanakannya pengawasan Apotek dan toko Obat terhadap pemenuhan standar dan persyaratan sebanyak 30 Sarana Pelayanan Kefarmasian dan BIMTEK sarana Pelayanan Kefarmasian Sebanyak 55 Peserta Yang terdiri dari Pemilik dan Apoteker Penanggung Jawab Sarana Pelayanan Kefarmasian
	Kegiatan yang dilaksanakan	dilaksanakannya pengawasan Apotek dan toko Obat terhadap pemenuhan standar dan persyaratan Sarana Pelayanan Kefarmasian dan BIMTEK sarana Pelayanan Kefarmasian kepada Pemilik dan Apoteker Penanggung Jawab Sarana Pelayanan Kefarmasian
14	Kegiatan	Penerbitan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor P-IRT sebagai izin produksi untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga
59)	Sub Kegiatan	Penerbitan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor P-IRT sebagai izin produksi untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga
	Output Kegiatan ini	Telah dilakukannya Pertemuan Penyuluhan Keamanan Pangan dan Bimtek Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 1 Kali untuk pelaku usaha IRTP sebanyak 120 Orang, Pengawasan dan Pembinaan Terhadap Sarana IRTP yang sudah memiliki Izin sebanyak 40 Sarana, pengawasan Produk pangan Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) dengan mengirimkan 30 Sampel Produk untuk dilakukan pemeriksaan di BPOM Padang Penyuluhan keamanan pangan kepada masyarakat dan Kader sebanyak 120 Orang
	Kegiatan yang dilaksanakan	Dilaksanakannya Pertemuan Penyuluhan Keamanan Pangan dan Bimtek Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik , Pengawasan dan Pembinaan Terhadap Sarana IRTP yang sudah memiliki Izin, pengawasan Produk pangan Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) dengan mengirimkan Sampel Produk untuk dilakukan pemeriksaan di BPOM Padang dan Penyuluhan keamanan pangan kepada masyarakat dan Kader

V. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		
15.	Kegiatan	Advokasi Pemberdayaan Kemitraan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
60)	Sub Kegiatan	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan Advokasi Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
	Output Kegiatan ini	Terlaksananya transformasi Layanan Kesehatan Primer pada 6 (enam) Puskesmas Lokus ILP (40%) pada tahun 2024
	Kegiatan yang dilaksanakan	Orientasi, Pembinaan, Monitoring dan evaluasi ke puskesmas Lokus Integrasi Layanan Primer (ILP) sebanyak 6 (enam) Puskesmas. Kegiatan ini dilakukan oleh bidang Yan-SDK beserta Tim ILP Dinas Kesehatan. Beberapa hal yang dilakukan adalah terkait perubahan penataan ruangan yang mengikut sesuai ILP, pembinaan terkait perubahan SOP, Struktur Organisasi, layanan, dan Rekam Medis Elektronik
16.	Kegiatan	Kegiatan Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
61)	Sub Kegiatan	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
	Output Kegiatan ini	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telah dilakukan kegiatan Launching Gerakan Aksi Bergizi Serentak (GABS) di SMP Negeri I Sitiung pada tanggal 10 September 2024. Kegiatan ini melibatkan lintas sektor serta seluruh warga sekolah, khususnya remaja putri sebagai penerima manfaat langsung dari kegiatan ini. 2. Telah dilakukan Gerakan untuk mengaktifkan Posyandu yang bertujuan untuk percepatan penurunan Stunting. Kegiatan dilaksanakan di 10 Posyandu dengan sasaran seluruh siklus kehidupan, mulai dari Ibu Hamil, Bersalin dan Nifas, Bayi, Balita, Anak Pra Sekolah, Usia Sekolah dan Remaja sampai Usia Produktif dan Lansia 3. Telah dilakukan kegiatan Monev Program Promkes yang bertujuan untuk percepatan pencapaian dan kelancaran pelaksanaan program di Puskesmas dengan peserta Pengelola Program Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat serta Penanggung Jawab UKM/UKM Esensial Puskesmas se-Kabupaten Dharmasraya yang berjumlah 30 orang. 4. Telah dilakukan kegiatan Jambore Kader berupa Lomba Cerdas Cermat bagi Kader Posyandu sebanyak 45 orang Kader yang sekaligus bisa melatih Keterampilan Dasar Kader Posyandu dan memberikan pembinaan kepada Kader. 5. Telah dilakukan kegiatan Workshop dalam rangka Gerakan Jambore Kader Posyandu. Sasaran kegiatan ini sebanyak 165 orang yang terdiri dari Pengelola Program Promosi dan PM Puskesmas serta Kader Pusyandu se-Kabupaten Dharmasraya.
	Kegiatan yang dilaksanakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Kegiatan Launching Gerakan Aksi Bergizi Serentak (GABS) di SMP Negeri I Sitiung pada tanggal 10 September 2024 melibatkan lintas sektor serta seluruh warga sekolah, khususnya remaja putri sebagai penerima manfaat langsung dari kegiatan ini. rangkaian Pelaksanaan Gerakan Aksi Bergizi yang terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> a. Senam pagi/Olahraga bersama (Seluruh peserta didik mengikuti aktifitas fisik) b. Sarapan bersama (Seluruh peserta didik membawa Makanan Gizi Seimbang sesuai dengan Isi Piringku) c. Konsumsi TTD (Tablet Tambah Darah) secara bersama (TTD sudah disiapkan dan diberikan kepada peserta didik Remaja Putri untuk diminum secara serentak)

		<p>2. Pelaksanaan Gerakan Aktifkan Posyandu untuk mengaktifkan Posyandu bertujuan untuk percepatan penurunan Stunting. Kegiatan dilaksanakan di 10 Posyandu dengan sasaran seluruh siklus kehidupan, mulai dari Ibu Hamil, Bersalin dan Nifas, Bayi, Balita, Anak Pra Sekolah, Usia Sekolah dan Remaja sampai Usia Produktif dan Lansia. Kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas Posyandu dan kemampuan Kader dalam pengelolaan dan pelayanan di Posyandu serta meningkatkan kapasitas SDM Kelompok Kerja Operasional Posyandu Kabupaten Dharmasraya.</p> <p>3. Pelaksanaan kegiatan Monev Program Promkes yang bertujuan untuk percepatan pencapaian dan kelancaran pelaksanaan program di Puskesmas dengan peserta Pengelola Program Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat serta Penanggung Jawab UKM/UKM Esensial Puskesmas se-Kabupaten Dharmasraya. Kegiatan Monev dilakukan terhadap capaian program :</p> <ol style="list-style-type: none"> Aktifkan Posyandu Indikator Germas RT ber-PHBS Posyandu ILP dengan Seluruh Siklus Hidup Sarana Poskesri dan Posyandu <p>Disamping itu juga dilakukan pembinaan kepada Pengelola Program Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat di Puskesmas</p> <p>4. Pelaksanaan kegiatan Jambore Kader berupa Lomba Cerdas Cermat bagi Kader Posyandu bertujuan untuk melatih Keterampilan Dasar Kader Posyandu dan memberikan pembinaan kepada Kader.</p> <p>Pelaksanaan kegiatan Workshop dalam rangka Gerakan Jambore Kader Posyandu yang diikuti oleh Pengelola Program Promosi dan PM Puskesmas serta Kader Pusyandu se-Kabupaten Dharmasraya bertujuan untuk meningkatkan kualitas Posyandu dan kemampuan Kader dalam pengelolaan dan pelayanan di Posyandu serta meningkatkan kapasitas SDM Kelompok Kerja Operasional Posyandu Kabupaten Dharmasraya.</p>
17.	Kegiatan	Operasional Pelayanan UPT
62)	Sub Kegiatan	Operasional Pelayanan UPT Puskesmas
	Output Kegiatan ini	Terlaksananya operasional pelayanan kesehatan yang menjadi program prioritas di 15 UPT Puskesmas
	Kegiatan yang dilaksanakan	Terlaksananya kegiatan untuk mendukung program SPM kesehatan di puskesmas
63)	Sub Kegiatan	Operasional Pelayanan RSUD Sungai Rumbai
	Output Kegiatan ini	Terpenuhinya Operasional Pelayanan UPT RSUD Sungai Rumbai
	Kegiatan yang dilaksanakan	Terlaksananya Pembuatan Gedung Haemodialisa Terpenuhi Alkes Rawat Jalan dan UTDRS sesuai dengan Pagu yang telah diberikan Terlaksananya Operasional Pelayanan UPT RSUD Sungai Rumbai
64)	Sub Kegiatan	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (LABKESDA)
	Output Sub Kegiatan ini	Terlaksananya layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten Dharmasraya, yaitu terpenuhinya segala kebutuhan guna menunjang operasional dan terlaksananya kegiatan penilaian akreditasi Laboratorium Kesehatan Daerah mulai dari tahapan bimbingan, pembinaan hingga Survey penilaian Akreditasi di UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah

	Kegiatan yang dilaksanakan	Pelayanan fasilitas kesehatan rujukan yang berfokus pada pelayanan pemeriksaan laboratorium, yang meliputi kegiatan belanja operasional bahan habis pakai, perawatan peralatan laboratorium, penyediaan prasarana penunjang pelayanann serta peningkatan sumber daya manusia dan pemantapan mutu pemeriksaan laboratorium berupa kegiatan Akreditasi Laboratorium Kesehatan.
--	----------------------------	--

KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DITETAPKAN TAHUN 2024

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan Masalah Diselesaikan
1	Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024	Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor :100.3.3.2/66/KPTS-BUP-2024	Memberikan Perlindungan Kepada Masyarakat dan penyalahgunaan Obat dan bahan berbahaya dalam obat dan makanan dengan melakukan pengawasan dan Koordinasi dengan Lintas OPD dan Sektor terkait (LOKA POM Dharmasraya) dalam hal Pengawasan obat dan makanan dikabupaten Dharmasraya
2	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	SK Bupati No. 100.3.3.2/41/KPTS-BUP/2024	<ol style="list-style-type: none"> 1. Didapatkan data kepesertaan yang valid sesuai dengan berita acara rekonsiliasi antara BPJS Kesehatan, Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan. 2. Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan terhadap seluruh masyarakat miskin dan tidak mampu agar tercapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal secara efektif dan efisien.

BAB III PENUTUP

Kesimpulan

Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya berdasarkan DPA 2024 yang terdiri dari 5 program, 17 kegiatan dan 63 Sub Kegiatan. Pelaksanaan kegiatan pembangunan kesehatan ini disusun sesuai dengan rencana kerja Dinas Kesehatan Tahun 2024, dan ini merupakan pertanggung jawaban tugas dan fungsi serta hasil - hasil yang dicapai maupun permasalahan yang ada serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan selama tahun 2024.

Saran

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan program, maka diharapkan dukungan dari pihak terkait dalam penyusunan perencanaan program dan kegiatan Dinas Kesehatan kedepannya.

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KAB. DHARMASRAYA TAHUN ANGGARAN 2024	FORMULIR PERUBAHAN DPA-BELANJA SKPD
--	--

Nomor DPPA : DPPA/A.3/1.02.0.00.0.00.01.0000/001/2024
 SKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T. 1	Jumlah											T+1	
									Tahun					Bertambah / (Berkurang)							
									Sebelum					Setelah					Rp		%
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			
1.02.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan								Rp111.626.436.772,00	Rp12.636.643.636,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp124.263.080.408,00	Rp106.356.386.254,00	Rp12.637.435.376,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp118.993.821.630,00	(Rp5.269.258.778,00)	(4,43)		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			Rp111.626.436.772,00	Rp12.636.643.636,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp124.263.080.408,00	Rp106.356.386.254,00	Rp12.637.435.376,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp118.993.821.630,00	(Rp5.269.258.778,00)	(4,43)		
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			Rp111.626.436.772,00	Rp12.636.643.636,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp124.263.080.408,00	Rp106.356.386.254,00	Rp12.637.435.376,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp118.993.821.630,00	(Rp5.269.258.778,00)	(4,43)		
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Rp81.183.890.322,00	Rp24.778.598,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp81.208.668.920,00	Rp68.758.402.996,00	Rp21.702.598,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp68.780.105.594,00	(Rp12.428.563.326,00)	(18,07)		
1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Rp77.131.452.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp77.131.452.500,00	Rp65.410.581.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp65.410.581.800,00	(Rp11.720.870.700,00)	(17,92)		
1	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Rp77.093.637.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp77.093.637.000,00	Rp65.379.767.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp65.379.767.000,00	(Rp11.713.870.000,00)	(17,92)		
1	02	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Rp14.327.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp14.327.500,00	Rp7.326.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.326.800,00	(Rp7.000.700,00)	(95,55)		
1	02	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Rp23.488.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp23.488.000,00	Rp23.488.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp23.488.000,00	Rp0,00	0,00		
1	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			Rp39.969.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp39.969.200,00	Rp32.838.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp32.838.500,00	(Rp7.130.700,00)	(21,71)		
1	02	01	2.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Rp13.504.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.504.200,00	Rp6.503.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.503.500,00	(Rp7.000.700,00)	(107,65)		
1	02	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Rp26.465.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp26.465.000,00	Rp26.335.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp26.335.000,00	(Rp130.000,00)	(0,49)		
1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			Rp192.073.400,00	Rp14.951.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp207.024.400,00	Rp289.061.100,00	Rp11.875.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp280.936.100,00	Rp73.911.700,00	26,31		
1	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Rp5.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.000.000,00	Rp5.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.000.000,00	Rp0,00	0,00		
1	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Rp42.080.000,00	Rp13.751.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp55.831.000,00	Rp42.080.000,00	Rp10.675.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp52.755.000,00	(Rp3.076.000,00)	(5,83)		

Ususan	Bidang Ususan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah													T+1
								T. 1	Tahun										Bertambah / (Berkurang)		
									Sebelum					Setelah					Rp	%	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			
1	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh		Rp9.995.000,00	Rp1.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.195.000,00	Rp9.995.000,00	Rp1.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.195.000,00	Rp0,00	0,00	
1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh		Rp15.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.000.000,00	Rp15.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.000.000,00	Rp0,00	0,00	
1	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh		Rp19.999.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp19.999.900,00	Rp19.999.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp19.999.900,00	Rp0,00	0,00	
1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh		Rp99.998.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp99.998.500,00	Rp176.986.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp176.986.200,00	Rp76.987.700,00	43,50	
1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Rp3.762.895.222,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.762.895.222,00	Rp2.923.421.596,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.923.421.596,00	(Rp839.473.626,00)	(22,72)		
1	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh		Rp4.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.000.000,00	Rp4.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.000.000,00	Rp0,00	0,00	
1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh		Rp74.980.822,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp74.980.822,00	Rp91.879.996,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp91.879.996,00	Rp16.899.174,00	18,39	
1	02	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh		Rp7.440.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.440.000,00	Rp10.440.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.440.000,00	Rp3.000.000,00	28,74	
1	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh		Rp3.676.474.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.676.474.400,00	Rp2.817.101.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.817.101.600,00	(Rp859.372.800,00)	(30,51)	
1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Rp57.500.000,00	Rp9.827.598,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp67.327.598,00	Rp122.500.000,00	Rp9.827.598,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp132.327.598,00	Rp65.000.000,00	49,12	
1	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh		Rp16.700.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.700.000,00	Rp16.700.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.700.000,00	Rp0,00	0,00	
1	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Pertinanan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh		Rp40.800.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp40.800.000,00	Rp105.800.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp105.800.000,00	Rp65.000.000,00	61,44	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah															
								T-1	Tahun										Bertambah / (Berkurang)		T+1		
									Sebelum					Setelah					Rp	%			
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah					
1	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Darah		Rp0,00	Rp9.827.598,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.827.598,00	Rp0,00	Rp9.827.598,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.827.598,00	Rp0,00	0,00
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			Rp28.303.082.900,00	Rp12.611.865.038,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp40.914.947.938,00	Rp35.345.015.358,00	Rp12.615.732.778,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp47.960.748.136,00	Rp7.045.800.198,00			14,69		
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			Rp7.228.653.060,00	Rp12.389.291.738,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp19.617.944.798,00	Rp7.249.384.518,00	Rp12.388.559.478,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp19.617.943.998,00	(Rp802,00)			(0,00)		
1	02	02	2.01	0004	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Darah		Rp22.246.000,00	Rp538.320.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp560.566.000,00	Rp22.246.000,00	Rp538.320.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp560.566.000,00	Rp0,00			0,00	
1	02	02	2.01	0006	Pengembangan Puskesmas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Rp312.983.900,00	Rp11.560.971.738,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.873.955.638,00	Rp333.715.358,00	Rp11.540.239.478,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.873.954.836,00	(Rp802,00)			(0,00)	
1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Darah		Rp0,00	Rp290.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp290.000.000,00	Rp0,00	Rp290.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp290.000.000,00	Rp0,00			0,00	
1	02	02	2.01	0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Darah		Rp219.080.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp219.080.900,00	Rp219.080.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp219.080.900,00	Rp0,00			0,00	
1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Darah		Rp6.560.003.660,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.560.003.660,00	Rp6.560.003.660,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.560.003.660,00	Rp0,00			0,00	
1	02	02	2.01	0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp114.338.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp114.338.600,00	Rp114.338.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp114.338.600,00	Rp0,00			0,00	
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			Rp20.694.434.990,00	Rp222.573.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.917.008.290,00	Rp27.715.660.490,00	Rp247.173.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp27.962.833.790,00	Rp7.045.825.500,00			25,20		
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Darah		Rp216.733.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp216.733.000,00	Rp216.733.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp216.733.000,00	Rp0,00			0,00	
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Darah		Rp187.520.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp187.520.800,00	Rp187.520.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp187.520.800,00	Rp0,00			0,00	
1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Darah		Rp312.183.850,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp312.183.850,00	Rp312.183.850,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp312.183.850,00	Rp0,00			0,00	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah										T+1				
								T-1	Tahun					Bertambah / (Berkurang)								
									Sebelum					Setelah					Rp	%		
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer				Jumlah	
1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Rp245.416.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp245.416.000,00	Rp245.416.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp245.416.000,00	Rp0,00	0,00
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Rp50.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp50.000.000,00	Rp0,00	0,00
1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Rp78.001.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp78.001.000,00	Rp78.001.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp78.001.000,00	Rp0,00	0,00
1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Rp33.401.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp33.401.000,00	Rp33.401.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp33.401.000,00	Rp0,00	0,00
1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Rp228.197.140,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp228.197.140,00	Rp228.197.140,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp228.197.140,00	Rp0,00	0,00
1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Rp135.125.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp135.125.000,00	Rp135.125.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp135.125.000,00	Rp0,00	0,00
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp50.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp50.000.000,00	Rp0,00	0,00
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Rp348.509.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp348.509.900,00	Rp348.509.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp348.509.900,00	Rp0,00	0,00
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Rp50.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp50.000.000,00	Rp0,00	0,00
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Rp41.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp41.000.000,00	Rp41.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp41.000.000,00	Rp0,00	0,00
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Rp141.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp141.000.000,00	Rp141.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp141.000.000,00	Rp0,00	0,00
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Rp562.585.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp562.585.000,00	Rp562.585.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp562.585.000,00	Rp0,00	0,00

Unsur	Bilang Unsur	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											T+1		
								T-1	Tahun											Bertambah / (Berkurang)	
									Sebelum					Setelah						Rp	%
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Rp250.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp250.000.000,00	Rp250.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp250.000.000,00	Rp0,00	0,00		
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Rp97.010.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp97.010.000,00	Rp97.010.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp97.010.000,00	Rp0,00	0,00		
1	02	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Rp59.400.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp59.400.000,00	Rp59.400.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp59.400.000,00	Rp0,00	0,00		
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Rp175.240.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp175.240.000,00	Rp174.490.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp174.490.000,00	(Rp750.000,00)	(0,43)		
1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Rp16.391.746.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.391.746.400,00	Rp23.440.170.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp23.440.170.400,00	Rp7.048.424.000,00	30,07		
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Rp641.852.200,00	Rp17.425.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp659.277.200,00	Rp617.243.500,00	Rp42.025.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp659.288.500,00	(Rp8.700,00)	(0,00)		
1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Rp161.051.700,00	Rp205.148.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp366.200.000,00	Rp161.051.700,00	Rp205.148.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp366.200.000,00	Rp0,00	0,00		
1	02	02	2.02	0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Rp101.270.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp101.270.000,00	Rp45.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp45.000.000,00	(Rp56.270.000,00)	(125,04)		
1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Rp27.060.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp27.060.000,00	Rp27.060.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp27.060.000,00	Rp0,00	0,00		
1	02	02	2.02	0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Rp110.132.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp110.132.000,00	Rp110.132.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp110.132.000,00	Rp0,00	0,00		
1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp54.430.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp54.430.200,00	Rp54.430.200,00	100,00			
1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi			Rp131.025.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp131.025.000,00	Rp131.012.250,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp131.012.250,00	(Rp12.750,00)	(0,01)		

Uraian	Bidang Uraian	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											T+1		
								T-1	Tahun					Bertambah / (Berkurang)							
									Sebelum					Setelah						Rp	%
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			
1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Rp131.025.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp131.025.000,00	Rp131.012.250,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp131.012.250,00	(Rp12.750,00)	(0,01)
1	02	02	2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			Rp248.969.850,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp248.969.850,00	Rp248.958.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp248.958.100,00	(Rp11.750,00)	(0,00)	
1	02	02	2.04	0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Rp248.969.850,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp248.969.850,00	Rp248.958.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp248.958.100,00	(Rp11.750,00)	(0,00)	
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			Rp1.506.612.550,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.506.612.550,00	Rp1.518.846.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.518.846.900,00	Rp12.234.350,00	0,81	
1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota			Rp449.702.850,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp449.702.850,00	Rp461.937.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp461.937.400,00	Rp12.234.550,00	2,65	
1	02	03	2.02	0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik; Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Rp449.702.850,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp449.702.850,00	Rp461.937.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp461.937.400,00	Rp12.234.550,00	2,65	
1	02	03	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			Rp1.056.909.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.056.909.700,00	Rp1.056.909.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.056.909.500,00	(Rp200,00)	(0,00)	
1	02	03	2.03	0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Rp1.056.909.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.056.909.700,00	Rp1.056.909.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.056.909.500,00	(Rp200,00)	(0,00)	
1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN			Rp372.331.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp372.331.000,00	Rp372.331.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp372.331.000,00	Rp0,00	0,00	
1	02	04	2.01		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)			Rp63.730.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp63.730.000,00	Rp63.730.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp63.730.000,00	Rp0,00	0,00	
1	02	04	2.01	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Rp63.730.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp63.730.000,00	Rp63.730.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp63.730.000,00	Rp0,00	0,00	
1	02	04	2.03		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga			Rp308.601.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp308.601.000,00	Rp308.601.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp308.601.000,00	Rp0,00	0,00	
1	02	04	2.03	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Rp308.601.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp308.601.000,00	Rp308.601.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp308.601.000,00	Rp0,00	0,00	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											T+1		
								T-1	Tahun											Bertambah / (Berkurang)	
									Sebelum					Setelah						Rp	%
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Rp972.000.000,00	Rp45.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.017.000.000,00	Rp1.467.591.840,00	Rp40.350.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.507.941.840,00	Rp490.941.840,00	32,56		
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD			Rp972.000.000,00	Rp45.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.017.000.000,00	Rp1.467.591.840,00	Rp40.350.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.507.941.840,00	Rp490.941.840,00	32,56		
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Sungai Rumbai	Rp972.000.000,00	Rp45.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.017.000.000,00	Rp1.467.591.840,00	Rp40.350.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.507.941.840,00	Rp490.941.840,00	32,56		
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			Rp1.048.702.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.048.702.000,00	Rp1.051.442.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.051.442.000,00	Rp2.740.000,00	0,26		
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			Rp1.048.702.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.048.702.000,00	Rp1.051.442.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.051.442.000,00	Rp2.740.000,00	0,26		
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Kab. Dharmasraya, Sungai Rumbai, Sungai Rumbai	Rp1.048.702.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.048.702.000,00	Rp1.051.442.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.051.442.000,00	Rp2.740.000,00	0,26		
1.02.0.00.0.00.01.0003 - Puskesmas Koto Besar								Rp1.570.314.000,00	Rp20.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.590.314.000,00	Rp1.886.941.741,00	Rp65.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.951.941.741,00	Rp361.627.741,00	18,53		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			Rp1.570.314.000,00	Rp20.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.590.314.000,00	Rp1.886.941.741,00	Rp65.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.951.941.741,00	Rp361.627.741,00	18,53		
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			Rp1.570.314.000,00	Rp20.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.590.314.000,00	Rp1.886.941.741,00	Rp65.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.951.941.741,00	Rp361.627.741,00	18,53		
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Rp799.000.000,00	Rp20.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp819.000.000,00	Rp1.115.627.741,00	Rp65.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.180.627.741,00	Rp361.627.741,00	30,63		
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD			Rp799.000.000,00	Rp20.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp819.000.000,00	Rp1.115.627.741,00	Rp65.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.180.627.741,00	Rp361.627.741,00	30,63		
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Besar	Rp799.000.000,00	Rp20.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp819.000.000,00	Rp1.115.627.741,00	Rp65.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.180.627.741,00	Rp361.627.741,00	30,63		
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			Rp771.314.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp771.314.000,00	Rp771.314.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp771.314.000,00	Rp0,00	0,00		
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			Rp771.314.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp771.314.000,00	Rp771.314.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp771.314.000,00	Rp0,00	0,00		
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Kab. Dharmasraya, Koto Besar, Koto Besar	Rp771.314.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp771.314.000,00	Rp771.314.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp771.314.000,00	Rp0,00	0,00		
1.02.0.00.0.00.01.0004 - Puskesmas Sungai Limau								Rp1.381.710.246,00	Rp26.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.407.710.246,00	Rp1.446.432.348,00	Rp26.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.472.432.348,00	Rp64.722.102,00	4,40		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			Rp1.381.710.246,00	Rp26.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.407.710.246,00	Rp1.446.432.348,00	Rp26.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.472.432.348,00	Rp64.722.102,00	4,40		
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			Rp1.381.710.246,00	Rp26.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.407.710.246,00	Rp1.446.432.348,00	Rp26.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.472.432.348,00	Rp64.722.102,00	4,40		
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Rp422.886.246,00	Rp26.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp448.886.246,00	Rp487.226.348,00	Rp26.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp513.226.348,00	Rp64.340.102,00	12,54		
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD			Rp422.886.246,00	Rp26.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp448.886.246,00	Rp487.226.348,00	Rp26.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp513.226.348,00	Rp64.340.102,00	12,54		
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Sungai Limau	Rp422.886.246,00	Rp26.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp448.886.246,00	Rp487.226.348,00	Rp26.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp513.226.348,00	Rp64.340.102,00	12,54		

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah													T+1			
								T. 1	Tahun										Bertambah / (Berkurang)					
									Sebelum					Setelah					Rp	%				
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah						
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			Rp958.824.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp958.824.000,00	Rp959.206.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp959.206.000,00	Rp382.000,00	0,04		
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			Rp958.824.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp958.824.000,00	Rp959.206.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp959.206.000,00	Rp382.000,00	0,04		
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Dharmasraya, Asam Jujuhan, Sungai Limau			Rp958.824.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp958.824.000,00	Rp959.206.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp959.206.000,00	Rp382.000,00	0,04		
1.02.0.00.0.00.01.0005 - Puskesmas Koto Baru								Rp2.838.241.057,00	Rp59.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.897.241.057,00	Rp3.117.959.788,00	Rp59.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.176.959.788,00	Rp279.718.731,00	8,80				
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			Rp2.838.241.057,00	Rp59.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.897.241.057,00	Rp3.117.959.788,00	Rp59.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.176.959.788,00	Rp279.718.731,00	8,80				
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			Rp2.838.241.057,00	Rp59.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.897.241.057,00	Rp3.117.959.788,00	Rp59.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.176.959.788,00	Rp279.718.731,00	8,80				
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Rp1.727.476.057,00	Rp59.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.786.476.057,00	Rp2.007.194.788,00	Rp59.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.066.194.788,00	Rp279.718.731,00	13,54				
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD			Rp1.727.476.057,00	Rp59.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.786.476.057,00	Rp2.007.194.788,00	Rp59.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.066.194.788,00	Rp279.718.731,00	13,54				
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru			Rp1.727.476.057,00	Rp59.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.786.476.057,00	Rp2.007.194.788,00	Rp59.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.066.194.788,00	Rp279.718.731,00	13,54		
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			Rp1.110.765.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.110.765.000,00	Rp1.110.765.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.110.765.000,00	Rp0,00	0,00		
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			Rp1.110.765.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.110.765.000,00	Rp1.110.765.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.110.765.000,00	Rp0,00	0,00		
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Dharmasraya, Koto Baru, Koto Baru			Rp1.110.765.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.110.765.000,00	Rp1.110.765.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.110.765.000,00	Rp0,00	0,00	
1.02.0.00.0.00.01.0006 - Puskesmas Tumpang								Rp1.380.496.000,00	Rp20.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.400.496.000,00	Rp1.652.278.551,00	Rp22.584.682,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.674.863.233,00	Rp274.367.233,00	16,38				
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			Rp1.380.496.000,00	Rp20.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.400.496.000,00	Rp1.652.278.551,00	Rp22.584.682,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.674.863.233,00	Rp274.367.233,00	16,38				
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			Rp1.380.496.000,00	Rp20.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.400.496.000,00	Rp1.652.278.551,00	Rp22.584.682,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.674.863.233,00	Rp274.367.233,00	16,38				
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Rp476.000.000,00	Rp20.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp496.000.000,00	Rp747.782.551,00	Rp22.584.682,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp770.367.233,00	Rp274.367.233,00	35,62				
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD			Rp476.000.000,00	Rp20.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp496.000.000,00	Rp747.782.551,00	Rp22.584.682,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp770.367.233,00	Rp274.367.233,00	35,62				
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Dharmasraya, Tumpang, Tumpang			Rp476.000.000,00	Rp20.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp496.000.000,00	Rp747.782.551,00	Rp22.584.682,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp770.367.233,00	Rp274.367.233,00	35,62		
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			Rp904.496.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp904.496.000,00	Rp904.496.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp904.496.000,00	Rp0,00	0,00		
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			Rp904.496.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp904.496.000,00	Rp904.496.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp904.496.000,00	Rp0,00	0,00		
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas	Kab. Dharmasraya, Tumpang, Tumpang			Rp904.496.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp904.496.000,00	Rp904.496.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp904.496.000,00	Rp0,00	0,00	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											T+1		
								T. 1	Tahun											Bertambah / (Berkurang)	
									Sebelum					Setelah						Rp	%
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			
1.02.0.00.0.00.01.0007 - Puskesmas Padang Laweh								Rp1.091.394.400,00	Rp14.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.105.394.400,00	Rp1.333.185.024,00	Rp8.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.341.185.024,00	Rp235.790.624,00	17,58		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			Rp1.091.394.400,00	Rp14.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.105.394.400,00	Rp1.333.185.024,00	Rp8.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.341.185.024,00	Rp235.790.624,00	17,58		
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			Rp1.091.394.400,00	Rp14.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.105.394.400,00	Rp1.333.185.024,00	Rp8.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.341.185.024,00	Rp235.790.624,00	17,58		
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Rp390.920.400,00	Rp14.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp404.920.400,00	Rp632.723.024,00	Rp8.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp640.723.024,00	Rp235.802.624,00	36,80		
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD			Rp390.920.400,00	Rp14.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp404.920.400,00	Rp632.723.024,00	Rp8.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp640.723.024,00	Rp235.802.624,00	36,80		
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Pendapatan dari BLUD	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Padang Laweh	Rp390.920.400,00	Rp14.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp404.920.400,00	Rp632.723.024,00	Rp8.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp640.723.024,00	Rp235.802.624,00	36,80		
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			Rp700.474.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp700.474.000,00	Rp700.462.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp700.462.000,00	(Rp12.000,00)	(0,00)		
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			Rp700.474.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp700.474.000,00	Rp700.462.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp700.462.000,00	(Rp12.000,00)	(0,00)		
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas	Kab. Dharmasraya, Padang Laweh, Padang Laweh	Rp700.474.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp700.474.000,00	Rp700.462.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp700.462.000,00	(Rp12.000,00)	(0,00)		
1.02.0.00.0.00.01.0008 - Puskesmas Situng I								Rp2.164.689.537,00	Rp100.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.264.689.537,00	Rp2.820.247.922,00	Rp100.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.920.247.922,00	Rp655.558.385,00	22,45		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			Rp2.164.689.537,00	Rp100.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.264.689.537,00	Rp2.820.247.922,00	Rp100.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.920.247.922,00	Rp655.558.385,00	22,45		
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			Rp2.164.689.537,00	Rp100.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.264.689.537,00	Rp2.820.247.922,00	Rp100.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.920.247.922,00	Rp655.558.385,00	22,45		
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Rp1.179.664.537,00	Rp100.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.279.664.537,00	Rp1.835.222.922,00	Rp100.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.935.222.922,00	Rp655.558.385,00	33,88		
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD			Rp1.179.664.537,00	Rp100.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.279.664.537,00	Rp1.835.222.922,00	Rp100.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.935.222.922,00	Rp655.558.385,00	33,88		
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Dharmasraya, Situng, Situng	Rp1.179.664.537,00	Rp100.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.279.664.537,00	Rp1.835.222.922,00	Rp100.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.935.222.922,00	Rp655.558.385,00	33,88		
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			Rp985.025.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp985.025.000,00	Rp985.025.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp985.025.000,00	Rp0,00	0,00		
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			Rp985.025.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp985.025.000,00	Rp985.025.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp985.025.000,00	Rp0,00	0,00		
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas	Kab. Dharmasraya, Situng, Situng	Rp985.025.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp985.025.000,00	Rp985.025.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp985.025.000,00	Rp0,00	0,00		
1.02.0.00.0.00.01.0009 - Puskesmas Timpeh								Rp1.466.213.000,00	Rp20.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.486.213.000,00	Rp1.932.575.240,00	Rp44.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.976.575.240,00	Rp490.362.240,00	24,81		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			Rp1.466.213.000,00	Rp20.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.486.213.000,00	Rp1.932.575.240,00	Rp44.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.976.575.240,00	Rp490.362.240,00	24,81		
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			Rp1.466.213.000,00	Rp20.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.486.213.000,00	Rp1.932.575.240,00	Rp44.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.976.575.240,00	Rp490.362.240,00	24,81		
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Rp557.243.000,00	Rp20.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp577.243.000,00	Rp1.023.608.240,00	Rp44.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.067.608.240,00	Rp490.362.240,00	45,93		
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD			Rp557.243.000,00	Rp20.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp577.243.000,00	Rp1.023.608.240,00	Rp44.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.067.608.240,00	Rp490.362.240,00	45,93		
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Kab. Dharmasraya,	Rp557.243.000,00	Rp20.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp577.243.000,00	Rp1.023.608.240,00	Rp44.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.067.608.240,00	Rp490.362.240,00	45,93		

Urusan	Bilang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												T+1	
								T. 1	Tahun										Bertambah / (Berkurang)		
									Sebelum					Setelah					Rp		%
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			
1.02.0.00.0.00.01.0012 - Puskesmas Beringin Sakti								Rp985.691.000,00	Rp6.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp991.691.000,00	Rp1.215.093.570,00	Rp8.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.223.093.570,00	Rp231.402.570,00	18,92		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			Rp985.691.000,00	Rp6.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp991.691.000,00	Rp1.215.093.570,00	Rp8.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.223.093.570,00	Rp231.402.570,00	18,92		
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			Rp985.691.000,00	Rp6.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp991.691.000,00	Rp1.215.093.570,00	Rp8.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.223.093.570,00	Rp231.402.570,00	18,92		
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Rp314.000.000,00	Rp6.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp320.000.000,00	Rp546.142.570,00	Rp8.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp554.142.570,00	Rp234.142.570,00	42,25		
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD			Rp314.000.000,00	Rp6.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp320.000.000,00	Rp546.142.570,00	Rp8.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp554.142.570,00	Rp234.142.570,00	42,25		
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Dharmasraya, Timpeh, Taratak Tinggi	Rp314.000.000,00	Rp6.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp320.000.000,00	Rp546.142.570,00	Rp8.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp554.142.570,00	Rp234.142.570,00	42,25		
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			Rp671.691.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp671.691.000,00	Rp668.951.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp668.951.000,00	(Rp2.740.000,00)	(0,41)		
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			Rp671.691.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp671.691.000,00	Rp668.951.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp668.951.000,00	(Rp2.740.000,00)	(0,41)		
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas	Kab. Dharmasraya, Timpeh, Taratak Tinggi	Rp671.691.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp671.691.000,00	Rp668.951.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp668.951.000,00	(Rp2.740.000,00)	(0,41)		
1.02.0.00.0.00.01.0013 - Puskesmas Silago								Rp1.640.831.934,00	Rp31.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.671.831.934,00	Rp1.717.056.545,00	Rp31.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.748.056.545,00	Rp76.224.611,00	4,36		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			Rp1.640.831.934,00	Rp31.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.671.831.934,00	Rp1.717.056.545,00	Rp31.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.748.056.545,00	Rp76.224.611,00	4,36		
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			Rp1.640.831.934,00	Rp31.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.671.831.934,00	Rp1.717.056.545,00	Rp31.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.748.056.545,00	Rp76.224.611,00	4,36		
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Rp815.033.934,00	Rp31.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp846.033.934,00	Rp891.254.545,00	Rp31.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp922.254.545,00	Rp76.220.611,00	8,26		
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD			Rp815.033.934,00	Rp31.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp846.033.934,00	Rp891.254.545,00	Rp31.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp922.254.545,00	Rp76.220.611,00	8,26		
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Pendapatan dari BLUD	Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Silago	Rp815.033.934,00	Rp31.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp846.033.934,00	Rp891.254.545,00	Rp31.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp922.254.545,00	Rp76.220.611,00	8,26		
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			Rp825.798.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp825.798.000,00	Rp825.802.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp825.802.000,00	Rp4.000,00	0,00		
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			Rp825.798.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp825.798.000,00	Rp825.802.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp825.802.000,00	Rp4.000,00	0,00		
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas	Kab. Dharmasraya, Sembilan Koto, Silago	Rp825.798.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp825.798.000,00	Rp825.802.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp825.802.000,00	Rp4.000,00	0,00		
1.02.0.00.0.00.01.0014 - Puskesmas Sungai Dareh								Rp2.554.589.436,00	Rp147.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.701.589.436,00	Rp2.928.175.232,00	Rp153.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.081.675.232,00	Rp380.085.796,00	12,33		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			Rp2.554.589.436,00	Rp147.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.701.589.436,00	Rp2.928.175.232,00	Rp153.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.081.675.232,00	Rp380.085.796,00	12,33		
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			Rp2.554.589.436,00	Rp147.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.701.589.436,00	Rp2.928.175.232,00	Rp153.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.081.675.232,00	Rp380.085.796,00	12,33		
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Rp1.501.547.436,00	Rp147.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.648.547.436,00	Rp1.875.133.232,00	Rp153.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.028.633.232,00	Rp380.085.796,00	18,74		
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD			Rp1.501.547.436,00	Rp147.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.648.547.436,00	Rp1.875.133.232,00	Rp153.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.028.633.232,00	Rp380.085.796,00	18,74		

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											T+1	
								Tahun										Bertambah / (Berkurang)		
								Sebelum					Setelah					Rp		%
								Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Rp1.501.547.436,00	Rp147.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.648.547.436,00	Rp1.875.133.232,00	Rp153.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.028.633.232,00	Rp380.085.796,00	18,74	
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			Rp1.053.042.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.053.042.000,00	Rp1.053.042.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.053.042.000,00	Rp0,00	0,00	
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			Rp1.053.042.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.053.042.000,00	Rp1.053.042.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.053.042.000,00	Rp0,00	0,00	
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Sungai Dareh	Rp1.053.042.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.053.042.000,00	Rp1.053.042.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.053.042.000,00	Rp0,00	0,00	
1.02.0.00.0.00.01.0015 - Puskesmas Sialang								Rp1.258.678.000,00	Rp20.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.278.678.000,00	Rp1.548.693.904,00	Rp40.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.588.693.904,00	Rp310.015.904,00	19,51	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			Rp1.258.678.000,00	Rp20.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.278.678.000,00	Rp1.548.693.904,00	Rp40.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.588.693.904,00	Rp310.015.904,00	19,51	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			Rp1.258.678.000,00	Rp20.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.278.678.000,00	Rp1.548.693.904,00	Rp40.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.588.693.904,00	Rp310.015.904,00	19,51	
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Rp555.370.000,00	Rp20.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp575.370.000,00	Rp845.385.904,00	Rp40.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp885.385.904,00	Rp310.015.904,00	35,01	
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD			Rp555.370.000,00	Rp20.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp575.370.000,00	Rp845.385.904,00	Rp40.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp885.385.904,00	Rp310.015.904,00	35,01	
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Gunung Selasih	Rp555.370.000,00	Rp20.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp575.370.000,00	Rp845.385.904,00	Rp40.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp885.385.904,00	Rp310.015.904,00	35,01	
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			Rp703.308.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp703.308.000,00	Rp703.308.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp703.308.000,00	Rp0,00	0,00	
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			Rp703.308.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp703.308.000,00	Rp703.308.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp703.308.000,00	Rp0,00	0,00	
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Gunung Selasih	Rp703.308.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp703.308.000,00	Rp703.308.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp703.308.000,00	Rp0,00	0,00	
1.02.0.00.0.00.01.0016 - Instalasi Gudang Farmasi Kabupaten								Rp54.430.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp54.430.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	(Rp54.430.200,00)	(Infinity)	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			Rp54.430.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp54.430.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	(Rp54.430.200,00)	(Infinity)	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			Rp54.430.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp54.430.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	(Rp54.430.200,00)	(Infinity)	
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			Rp54.430.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp54.430.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	(Rp54.430.200,00)	(Infinity)	
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			Rp54.430.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp54.430.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	(Rp54.430.200,00)	(Infinity)	
1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp54.430.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp54.430.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	(Rp54.430.200,00)	(Infinity)	
1.02.0.00.0.00.01.0017 - Laboratorium Kesehatan Daerah								Rp427.392.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp427.392.000,00	Rp575.964.248,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp575.964.248,00	Rp148.572.248,00	25,80	

Unsur	Bidang Unsur	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah													T+1		
								Tahun											Bertambah / (Berkurang)				
								Sebelum					Setelah						Rp	%			
								Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah						
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						Rp427.392.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp427.392.000,00	Rp575.964.248,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp575.964.248,00	Rp148.572.248,00	25,80	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						Rp427.392.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp427.392.000,00	Rp575.964.248,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp575.964.248,00	Rp148.572.248,00	25,80	
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						Rp175.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp175.000.000,00	Rp273.572.248,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp273.572.248,00	Rp98.572.248,00	36,03	
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD						Rp175.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp175.000.000,00	Rp273.572.248,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp273.572.248,00	Rp98.572.248,00	36,03	
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung				Rp175.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp175.000.000,00	Rp273.572.248,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp273.572.248,00	Rp98.572.248,00	36,03	
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						Rp252.392.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp252.392.000,00	Rp302.392.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp302.392.000,00	Rp50.000.000,00	16,53	
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						Rp252.392.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp252.392.000,00	Rp302.392.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp302.392.000,00	Rp50.000.000,00	16,53	
1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik; Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Dharmasraya, Pulau Punjung, Empat Koto Pulau Punjung				Rp252.392.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp252.392.000,00	Rp302.392.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp302.392.000,00	Rp50.000.000,00	16,53	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp8.271.212.334,00
Februari	Rp14.047.929.501,00
Maret	Rp10.121.944.011,00
April	Rp28.228.469.971,00
Mei	Rp14.005.537.238,00
Juni	Rp21.251.284.839,00
Juli	Rp18.017.935.126,00
Agustus	Rp9.774.319.082,00
September	Rp9.681.392.824,00
Oktober	Rp7.409.498.345,00
November	Rp14.734.751.898,00
Desember	Rp3.559.495.406,00
Jumlah	Rp159.103.770.575,00

Pulau Punjung, Tanggal 31 Oktober 2024
KEPALA DINAS KESEHATAN

YOSTA DEFINA, S.Farm Apt., M.KM.
NIP. 196908101991022001

Mengesahkan,
PPKD

ASRI LAP, M.Si
NIP. 197502251995011001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

1.	H. ADLISMAN, S.Sos, M.Si	196908251988021002	Sekretaris Daerah	
2.	DARISMAN, S.Si MM	197502172000031001	Wakil Ketua I	
3.	Drs. YEFRINALDI, MM	196706081994031008	Wakil Ketua II	
4.	KHAIRUDDIN, SE, MM	196505251986011005	Wakil Ketua III	
5.	ASRILAP, M.Si	197502251995011001	Sekretaris I	
6.	H. PARYANTO, S.Sos, MT	196906091988021001	Sekretaris II	
7.	RASYMI NOFRIADI, SE, M.Si	196911091990031008	Sekretaris III	

*) Sesuai periodisasi SPD

C. TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA

Uraian Mengenai Kebijakan, Program dan Kegiatan yang dilaksanakan sebagai bentuk tindak lanjut terhadap rekomendasi DPRD yang diberikan pada tahun anggaran sebelumnya. Laporan tentang tindak lanjut pemerintah daerah terhadap rekomendasi DPRD yang diberikan pada tahun anggaran sebelumnya dituangkan sebagaimana table berikut:

1. Dinas Kesehatan

No	Rekomendasi DPRD Tahun N-1	Tindak Lanjut	Tujuan/Permasalahan yang diselesaikan
1.	Dengan anggaran untuk Urusan Kesehatan sebesar Rp. 220.235.727.551,00 (dua ratus dua puluh milyar lebih) terealisasi sebesar Rp. 208.939.414.257,76 (dua ratus delapan milyar lebih) atau 94,87%, merupakan pencapaian target yang cukup baik, diharapkan kedepannya perencanaan program kerja dapat lebih baik lagi sehingga semua target/capaian kinerja lebih optimal dan terealisasi seluruhnya sesuai dengan rencana kerja	Perencanaan anggaran di Dinas Kesehatan berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja dan permasalahan program pada tahun sebelumnya, serta masukan dari lintas sector dan OPD terkait. Dimana Dinas Kesehatan berupaya untuk penetapan perencanaan anggaran program berdasarkan prioritas masalah yang ada di masing – masing program. Dengan harapan perencanaan program kerja dapat lebih baik sehingga semua target/capaian kinerja lebih optimal dan terealisasi sesuai dengan rencana kerja	Perencanaan anggaran berdasarkan prioritas masalah, dimana hasil capaian kinerja menjawab dan dapat meminimalkan permasalahan kesehatan yang ada di masyarakat.
2.	Terkait dengan masih adanya kasus kematian ibu melahirkan sebanyak 3 orang dan angka kematian bayi sebanyak 32 orang dan anak balita sebanyak 14 orang, perlu menjadi perhatian Dinas Kesehatan untuk melakukan pembinaan kepada tenaga kesehatan terutama Bidan Koordinator Puskesmas yang menangani	1. Mengaktifkan dan membentuk Puskesmas PONED, melaksanakan workshop atau pelatihan PONED. Pelayanan Obstetri Noenatal Emergensi Dasar (PONED) merupakan pelayanan yang diberikan kepada ibu hamil ,ibu bersalin, ibu nifas serta kegawatdaruratan bayi baik datang sendiri maupun rujukan dari poskesri atau	1. Terbentuknya Puskesmas PONED dengan tim yang terlatih secara professional maka penanganan kasus kegawatdaruratan dasar dapat diberikan secara cepat dan tepat sehingga terjadinya resiko komplikasi dan kematian pada ibu dan bayi dapat teratasi.

No	Rekomendasi DPRD Tahun N-1	Tindak Lanjut	Tujuan/Permasalahan yang diselesaikan
	<p>kehamilan dan persalinan tersebut, sehingga pelayanan terhadap kehamilan dan persalinan di Kabupaten Dharmasraya dapat lebih optimal dan angka kematian ibu dapat diturunkan. Serta memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang manfaat persalinan di fasilitas layanan kesehatan karena masih ditemukan persalinan dengan tenaga non kesehatan dan di non fasilitas layanan kesehatan sebanyak 10 orang</p>	<p>pustu, sebab itu diperlukan tim yang terlatih untuk penanganan kegawatdaruratan dasar maternal dan neonatal di Puskesmas sehingga dapat mencegah terjadinya resiko komplikasi dan kematian pada ibu dan bayi sampai di rumah sakit.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Melaksanakan monev, menyusun rencana aksi perbaikan kinerja bidan di Puskesmas dan melakukan evaluasi tindak lanjut perbaikan dari rencana aksi Bidan Koordinator Puskesmas. 3. Meningkatkan kompetensi bidan dengan mengadakan workshop atau pelatihan tentang kesehatan ibu dan anak untuk menurunkan AKI dan AKB 4. Meningkatkan promosi kesehatan kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung melalui media cetak dan elektronik tentang resiko kemungkinan terjadi apabila persalinan ditolong oleh tenaga non kesehatan dan tidak di fasilitas kesehatan. 	<ol style="list-style-type: none"> 2. Bidan Koordinator Puskesmas adalah sebagai penanggung jawab membina bidan di wilayah kerjanya. dengan meningkatkan penyeliaan kepada bidan wilayah/bidan desa, memberikan bimbingan langsung, pembahasan/bedah kasus, kunjungan ke lokasi, pembahasan umpan balik laporan, pertemuan audit maternal-perinatal (AMP) dan memagangkan bidan desa ke Puskesmas dengan tujuan agar capaian program terpenuhi sesuai standar. sehingga angka kematian ibu dan bayi dapat diturunkan. 3. Bidan harus mampu meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikapnya dalam memberikan pelayanan kebidanan. 4. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang manfaat persalinan di Fasyankes sehingga dapat menurunkan AKI dan AKB

No	Rekomendasi DPRD Tahun N-1	Tindak Lanjut	Tujuan/Permasalahan yang diselesaikan
3.	<p>Masih adanya kasus balita gizi kurang dan gizi buruk (<i>stunting</i>) yang pertumbuhannya belum sesuai dengan umur, salah satu faktor penyebab terbesarnya adalah pola asuh yang kurang efektif, untuk itu perlu dilakukan edukasi kepada keluarga bahwa pemberian gizi seimbang tidak harus mahal contoh protein tinggi ada pada daging bisa diganti dengan tempe atau telur, dan terkait dengan program bantuan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk penanggulangan stunting di Kabupaten Dharmasraya perlu lebih disosialisasikan kepada masyarakat, dikarenakan program tersebut masih belum menjangkau masyarakat secara keseluruhan di Kabupaten Dharmasraya.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan sosialisasi dan meningkatkan edukasi kepada keluarga Balita Gizi buruk, gizi kurang dan stunting. Dengan cara : <ol style="list-style-type: none"> a. Memberikan Asi Eksklusif kepada bayi dari sejak lahir sampai usia 6 bulan, dilanjutkan dengan memberikan MP-ASI yang bergizi lengkap dan seimbang b. Memberikan MP-ASI yang bergizi dan kaya protein hewani untuk untuk bayi yang berusia diatas 6 bulan c. Memberikan makanan bergizi lengkap dan seimbang sesuai cengan kebutuhan anak d. Menerapkan pola asuh dan Memantau perkembangan anak dan membawa balita ke Posyandu secara berkala dan mengoptimalkan kegiatan pemantauan pertumbuhan balita stunting dan gizi kurang di Pos Gizi 2. Mensosialisasikan kembali pelaksanaan PMT Lokal kepada masyarakat di tingkat Nagari 3. Perlunya dukungan sari semua pihak dan lintas sektor terkait terhadap pelaksanaan PMT local di Nagari dalam rangka pemenuhan kebutuhan Balita dan Ibu Hamil KEK dan Percepatan penurunan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan Pemantauan kepada Balita Gizi kurang dan Gizi buruk serta balita Stunting setiap bulan Bersama tim percepatan penurunan stunting 2. Petugas Kesehatan dan Ahli Gizi melaksanakan Pemantauan Makanan Pendamping ASI kepada Balita (MP-ASI) di Posyandu setiap bulan 3. Meningkatkan pola asuh dan konsumsi balita stunting dan gizi kurang sesuai dengan tatalaksana gizi yang sesuai standar. 4. Melaksanakan Audit kasus Stunting kepada Balita Stunting 5. Memantau pelaksanaan Pemberian Makanan Tambahan Lokal kepada Ibu hamil KEK dan Balita Gizi Kurang

No	Rekomendasi DPRD Tahun N-1	Tindak Lanjut	Tujuan/Permasalahan yang diselesaikan
		Stunting di Kabupaten Dharmasraya	
4	Tingkatkan peran nagari dalam percepatan penurunan stunting di Kabupaten Dharmasraya dengan langkah kongkret mulai dari perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan percepatan penurunan stunting tingkat nagari.		
5	Masih ada lansia yang belum terpantau kesehatannya, DPRD setuju untuk diaktifkan kembali Posyandu Lansia yang ada di Puskesmas sehingga kesehatan lansia terpantau secara menyeluruh dan berkala.	<p>Jumlah total posyandu lansia pada tahun 2023 sebanyak 209 posyandu tersebar di seluruh wilayah kerja puskesmas, Puskesmas dan Dinas Kesehatan berupaya mengaktifkan seluruh posyandu yang ada termasuk 25 posyandu lansia yang tidak aktif dengan cara :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mensosialisasikan ke masyarakat bahwa posyandu lansia bertransformasi ke posyandu terintegrasi ini bisa meningkatkan kunjungan lansia mendapatkan pelayanan di posyandu 2. Mengaktifkan peran kader maka perlu dilakukan pembinaan dan penyegaran kader posyandu lansia 3. Meningkatkan UKBM (upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat dalam hal pemenuhan sarana prasarana pelaksanaan kegiatan posyandu. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Posyandu lansia bertransformasi menjadi Posyandu Integrasi Layanan Prima (ILP). Artinya posyandu yang dahulu hanya melayani lansia saja, sekarang menjadi posyandu melayani satu siklus kehidupan, dari usia 0 tahun hingga lansia. Posyandu ILP bertujuan untuk mendekatkan layanan kesehatan kepada masyarakat dengan melayani kesehatan pada ibu hamil, ibu nifas, bayi, balita dan lansia untuk pencegahan penyakit menular dan tidak menular. Masyarakat yang ingin melakukan pemeriksaan kesehatan dapat bersama-sama dengan mudah menuju ke lokasi

No	Rekomendasi DPRD Tahun N-1	Tindak Lanjut	Tujuan/Permasalahan yang diselesaikan
		<p>4. Melaksanakan monev dan bimtek kegiatan posyandu lansia pada puskesmas</p> <p>5. Meningkatkan edukasi kepada masyarakat tentang manfaat Caregiver Kesehatan Lansia dan Perawatan Lansia jangka panjang.</p> <p>6. Melakukan Kunjungan Homecare untuk lansia yang ketergantungan Berat dan berkoordinasi dengan tim pengelola PTM (penyakit tidak menular).</p>	<p>posyandu</p> <p>2. Kader posyandu lansia sangat berperan membina kesehatan lansia di masyarakat yaitu sebagai penggerak, penyuluh dan membantu pelayanan serta memberikan pendampingan pada lansia dan keluarganya maka oleh sebab itu perlu dilakukan pembinaan dan penyegaran ilmu kader posyandu lansia.</p> <p>3. UKBM merupakan salah satu bentuk kegiatan kesehatan yang bersifat dari, oleh dan untuk masyarakat, maka peran serta masyarakat merupakan sebagai ujung tombak terlaksananya kegiatan posyandu dengan baik.</p> <p>4. Monev dilaksanakan untuk mengetahui capaian, tujuan dari suatu program, ada masalah, mencari pemecahan masalah dan mengevaluasi tindak lanjut pemecahan masalah.</p> <p>5. Caregiver lansia bertujuan agar</p>

No	Rekomendasi DPRD Tahun N-1	Tindak Lanjut	Tujuan/Permasalahan yang diselesaikan
			Keluarga dan masyarakat yang berada di sekitar lingkungan lansia mengetahui bagaimana cara memberikan perhatian, merawat dan menjaga orang lanjut usia
6	Masih banyak Puskesmas yang belum memiliki tenaga kesehatan terlatih dan adanya pertukaran tenaga kesehatan sehingga pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular tidak optimal, terkait dengan permasalahan ini, sebaiknya petugas yang terlatih tidak dimutasi sehingga pelaksanaan program tercapai sesuai dengan target.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sudah adanya anggaran melalui DAK Non Fisik dari kementerian kesehatan untuk pelatihan peningkatan kompetensi petugas di puskesmas 2. Mutasi pegawai di puskesmas, karena terkait dengan analisa jabatan dan analisa beban kerja (ANJAB ABK) di UPT Puskesmas untuk pemerataan kepegawaian. 	Meminta komitmen dari Kepala UPT Puskesmas agar pegawai yang sudah mendapatkan pelatihan tidak dipindahkan ke program lain dan tidak diusulkan untuk mutasi.
7	Kasus yang sama dengan Tahun 2022, terkait Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat, masih ada penduduk miskin yang belum terdaftar sebagai peserta penerima Bantuan Iuran PBPU/BP Pemda sebanyak 3.896 jiwa dan masih terdapat pekerja swasta/masyarakat mampu yang terdaftar menjadi peserta PBPU/BP Pemda, terkait dengan hal tersebut agar Pemerintah Daerah melakukan rekonsiliasi antara Dinas Kesehatan,	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan verifikasi ulang data melalui aplikasi SIGNG Dinas Sosial dan Update data kepesertaan agar penduduk yang miskin belum mempunyai jaminan kesehatan bisa terlayani dan menjadi peserta penerima bantuan iuran PBPU Pemda serta melakukan verivali pada data pekerja swasta/masyarakat mampu yang terdaftar menjadi peserta PBPU Pemda. 2. Telah melakukan rekonsiliasi setiap bulan antara Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. cakupan kepesertaan Kabupaten Dharmasraya per 1 April 2024 99,70 % dari jumlah penduduk 234.509 jiwa dan tercapainya UHC Kabupaten Dharmasraya Non Cut Off 98%. 2. Dengan melakukan rekonsiliasi setiap bulan dengan Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan BPJS Kesehatan diharapkan tidak

No	Rekomendasi DPRD Tahun N-1	Tindak Lanjut	Tujuan/Permasalahan yang diselesaikan
	Dinas Sosial, dan BPJS Kesehatan Cabang Solok dan agar Pemerintah Daerah segera melakukan kembali verifikasi dan mengupdate data peserta penerima Bantuan Iuran PBPU/BP tersebut.	BPJS Kesehatan Cabang Solok 3. Ketersediaan anggaran yang belum optimal yang mempengaruhi capaian masyarakat yang terdaftar dalam kepesertaan JKN.	adanya temuan atas Data Meninggal, Data Ganda serta Data NIK Tidak Valid.
8	Untuk kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan yang realisasi anggarannya sebesar 94,19%, akan tetapi kenyataannya dilapangan berdasarkan catatan permasalahan di dokumen LKPJ, dilaporkan masih ada Fasyankes yang tidak memiliki tempat penyimpanan sampah B3 dan sampah medis yang sesuai standar Peraturan Menteri Lingkungan Hidup serta masih ada masyarakat yang belum sadar akan pentingnya tempat Buang Air Besar yang sesuai standar kesehatan untuk itu Puskesmas dan Nagari agar memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat bahwa pentingnya menjaga kesehatan lingkungan dengan BAB pada tempat yang memenuhi standar kesehatan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk Puskesmas sudah memiliki MOU pengelolaan limbah medis kepada pihak ketiga. 2. Melakukan edukasi kepada pemilik praktek mandiri dan klinik fasilitas pelayanan agar melakukan MOU kepada pihak ketiga dalam pengelolaan limbah medis melalui organisasi profesi yang memiliki tempat pelayanan kesehatan. 3. Melakukan kolaborasi dengan perizinan agar tempat praktek memiliki MOU limbah medis yang merupakan indikator yang harus dilengkapi. 4. MOU pihak ketiga dalam pengelolaan limbah medis merupakan suatu kewajiban yang harus dimiliki oleh praktek mandiri dan klinik fasilitas pelayanan kesehatan. 5. Melakukan edukasi kepada pihak nagari agar masyarakat kita akses terhadap 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kita selalu melakukan pemantauan dan pengawasan dalam penyimpanan limbah medis. 2. Melakukan pertemuan dengan mengundang ketua organisasi profesi sebagai perpanjangan tangan dalam pengurusan MOU limbah Medis bagi anggota profesi yang membuka praktek pelayanan kesehatan. 3. Melakukan cek fisik bersama tim perizinan kepada tempat praktek pelayanan kesehatan sebelum izin praktek keluar. 4. Dengan adanya kewajiban ini maka organisasi profesi sudah memfasilitasi kepada pihak ketiga dalam pengelolaan limbah medis antara lain <ol style="list-style-type: none"> a. Klinik sudah memiliki MOU

No	Rekomendasi DPRD Tahun N-1	Tindak Lanjut	Tujuan/Permasalahan yang diselesaikan
		<p>jamban sehat.</p> <p>6.Selalu memberikan dukungan kepada masyarakat dalam merubah perilaku stop Buang Air Besar sembarangan (BABS)</p>	<p>limbah medis kepada pihak ketiga</p> <p>b. Praktek dokter gigi sudah memiliki MOU</p> <p>c. Praktek bidan mandiri dalam kepengurusan</p> <p>5. Diharapkan stop BABS itu bisa lebih dimaksimalkan lagi kedepannya dengan cara tidak ada lagi ditemui warga yang buang air besar sembarangan.</p> <p>6. Dengan terwujudnya Kabupaten Dharmasraya ODF sehingga Kabupaten Dharmasraya dapat mengikuti ajang Kabupaten Dharmasraya Sehat yang dapat mengimplementasikan 9 tatanan yaitu : tatanan kehidupan masyarakat sehat dan mandiri, tatanan permukiman dan fasilitas umum, tatanan pendidikan, tatanan pasar, tatanan pariwisata, tatanan transportasi dan tertib lalu lintas jalan, tatanan perkantoran dan perindustrian, tatanan</p>

No	Rekomendasi DPRD Tahun N-1	Tindak Lanjut	Tujuan/Permasalahan yang diselesaikan
			<p>perlindungan sosial, tatanan pencegahan dan penanganan bencana. Kabupaten Dharmasraya menjadi salah satu Kabupaten peraih anugerah Kabupaten/Kota Sehat (KKS) Swasti Saba Kategori Wistara pada “Malam Penganugerahan Tanda Penghargaan Swasti Saba Kabupaten/Kota Sehat Swasti Saba Wistara yang ke 3 (Tiga) Dan STBM Tahun 2023”</p> <p>7. Diharapkan perubahan perilaku masyarakat dapat diiringi dengan pembangunan jamban sehingga dapat terwujudnya akses jamban aman.</p>
9	<p>Masih kasus yang sama dengan Tahun 2022, di Tahun 2023 masih banyak Industri Skala Kecil hingga Skala Menengah yang belum terdaftar sebagai Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) dan mengurus izin, sehingga banyak yang belum mendapatkan Penyuluhan Keamanan Pangan dalam rangka</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberi masukan Kepada DPMTSP agar mengupayakan adanya Keputusan Bupati/ Peraturan Bupati agar setiap IRTP yang mengurus Perizinan sebelum dikeluarkan izinnya harus mendapatkan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga Pangan (SPP-IRT) 2. Bimtek Keamanan Pangan kepada 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Agar Semua IRTP yang mengurus Perizinan Memiliki Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga sehingga Semua IRTP Memiliki SPPIRT 2. Agar Pelaku Usaha/ Pemilik IRTP Mengerti Mengenai Proses Perizinan IRTP, Mutu dan Keamanan Pangan,

No	Rekomendasi DPRD Tahun N-1	Tindak Lanjut	Tujuan/Permasalahan yang diselesaikan
	<p>penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) sebagai salah satu syarat untuk terdaftar sebagai IRTP yang memiliki izin.</p> <p>Untuk itu diminta Dinas Kesehatan benar-benar melakukan Koordinasi Lintas Sektor dan Komitmen bersama (Koperindag, DPMPTSP, LOKA POM dan bagian Perekonomian) untuk dapat mendorong industri skala kecil hingga menengah untuk mengurus perizinan sehingga dapat meningkatkan efektifitas pengawasan produksi dan peredaran pangan industri yang ada serta dapat mewujudkan Produk IRTP yang mampu bersaing di pasar.</p>	<p>Penanggung Jawab / Pemilik IRTP dengan Melibatkan DPMTSP, Koperindag, LOKA POM dan Tenaga PKP</p> <p>3. Pengujian Sampel Produk IRTP ke Labor Balai POM Di padang</p>	<p>Teknologi Proses Pengolahan Pangan, Penggunaan Bahan Tambahan Pangan dan Bagaimana cara Produksi Pangan Olahan yang baik sehingga meningkatkan efektifitas pengawasan Produksi sehingga IRTP yang ada di dharmasraya menghasilkan produk-produk yang berkualitas dan dapat bersaing dengan Produk Lain di Pasar</p> <p>3. Agar Produk Yang dihasilkan berkualitas dan aman dari bahan tambahan yang berbahaya</p>
	<p>UPT RSUD Sungai Rumbai</p>		
1	<p>Agar UPT RSUD Sungai Rumbai melakukan sosialisasi secara berkesinambungan kepada masyarakat terkait dengan jadwal dan jenis layanan kesehatan yang ada di RSUD Sei Rumbai karena masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui jenis layanan yang ada</p>	<p>Terima kasih Atensinya/ masukan untuk UPT RSUD Sungai Rumbai, RSUD Sungai Rumbai telah Melakukan Sosialisasi terkait jadwal dan jenis layanan yang ada di RSUD Sungai Rumbai kepada Masyarakat melalui Media Sosial, melalui Rapat Koordinasi Tingkat Kecamatan, dan melalui FKTP serta Organisasi</p>	<p>UPT RSUD Sungai Rumbai sudah melakukan Tindak Lanjut agar Masyarakat mengetahui jadwal dan jenis layanan di RSUD Sungai Rumbai. Untuk meningkatkan Pelayanan kesehatan terhadap masyarakat.</p>

No	Rekomendasi DPRD Tahun N-1	Tindak Lanjut	Tujuan/Permasalahan yang diselesaikan
	di RSUD Sungai Rumbai	Profesi Kesehatan di Wilayah terdekat dengan RSUD Sungai Rumbai.	
2	Terkait dengan pendapatan yang tidak mencukupi dikarenakan rendahnya kunjungan pasien karena disebabkan tenaga dokter spesialis defenitif yang belum lengkap, diharapkan pihak RSUD Sungai Rumbai agar segera memproses pengajuan penambahan kebutuhan SDM terutama dokter spesialis defenitif ke BKPSDM Kabupaten Dharmasraya.	Terima kasih Atensinya/ masukan untuk UPT RSUD Sungai Rumbai,RSUD Sungai Rumbai Sudah mengajukan Penambahan Kebutuhan SDM terutama Dokter Spesialis Defenitif ke BKPSDM Kabupaten Dharmasraya. Pengajuan Kebutuhan SDM sudah di hitung berdasarkan ANJAB ABK RSUD Sungai Rumbai dan sudah di Usulkan melalui RENBUT.Usulan juga telah di sampaikan kepada Kementrian Kesehatan RI,namun dikembalikan ke Pemerintahan Daerah, untuk Proporsi spesialias menyesuaikan dengan RSUD yang ada di Kabupaten Dharmasraya untuk pemerataan penempatannya. Terima kasih Atensinya/ masukan untuk UPT RSUD Sungai Rumbai.	UPT RSUD Sungai Rumbai sudah melakukan tindak lanjut Agar kebutuhan SDM terutama Dokter Spesialis di RSUD Sungai Rumbai terpenuhi,sehingga kunjungan Pasien Meningkat dan Pendapatan RSUD Sungai Rumbai Mencukupi /meningkat juga. Agar Proporsi penempatan Dokter Spesialis di Kabupaten Dharmasraya terpenuhi dengan pemerataan penempatan di RSUD yang ada di kabupaten Dharmasraya,melalui kebijakan Pemerintah Daerah.
RSUD Sungai Dareh			
1	Terkait dengan rehabilitasi dan pemeliharaan RSUD Sungai Dareh yang belum selesai pengerjaannya,pengadaan prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan, pengadaan alat kesehatan dan alat penunjang medik di RSUD Sungai Dareh, DPRD setuju	Rehabilitasi dan pemeliharaan RSUD Sungai Dareh yang belum selesai pengerjaannya serta pengadaan prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan telah diselesaikan dengan pemberian kesempatan kerja dengan denda (KDP/Konstruksi Dalam Pengerjaan) dan telah PHO pada tanggal 18 Januari 2024 dan telah	Dengan diakomodirnya Kebutuhan RSUD Sungai Dareh Tahun Anggaran 2025 maka dapat tercapai Visi RSUD Menjadi Rumah Sakit Unggul dalam pelayanan dengan salah satu misinya “Memenuhi segala kebutuhan sarana dan prasarana pelayan rumah sakit yang bermutu,

No	Rekomendasi DPRD Tahun N-1	Tindak Lanjut	Tujuan/Permasalahan yang diselesaikan
	<p>untuk pemenuhan kebutuhan tersebut dialokasikan dari APBD, selama APBD memungkinkan untuk melakukan hal tersebut, akan tetapi Pemerintah Daerah juga harus lebih aktif lagi menarik anggaran dari pusat untuk memenuhi kebutuhan RSUD Sungai Dareh sehingga tidak memberatkan APBD.</p>	<p>dimasukkan dalam Anggaran pergeseran I.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk Anggaran yang berasal dari pusat, UPT Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Dareh sudah mengajukan Proposal Usulan kebutuhan yang berasal dari Dana Lokasi Khusus (DAK) tahun 2025 dengan rincian : <ul style="list-style-type: none"> Alkes Layanan Rujukan 33.135.461.828,-Pengadaan Sarana 62.035.451.000,-Pengadaan Prasarana 9.270..801.000,- Total Kebutuhan 104.441.713.828,- 2. Anggaran DAK bersifat Stimulans sehingga diharapkan Pemerintah Daerah juga menganggarkan kebutuhan Alat Kesehatan, Sarana dan Prasarana RSUD Sungai Dareh. Tambahan kebutuhan sarana dan prasarana untuk pindah ruangan di RSUD Sungai Dareh gedung baru seperti ;lift 2 unit, gedung rawat inap paru, gedung gizi, gedung loundri dan IPAL. 	<p>efektif dan efisien”</p>

BAB III PENUTUP

Kesimpulan

Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya berdasarkan DPA 2024 yang terdiri dari 5 program, 17 kegiatan dan 63 Sub Kegiatan. Pelaksanaan kegiatan pembangunan kesehatan ini disusun sesuai dengan rencana kerja Dinas Kesehatan Tahun 2024, dan ini merupakan pertanggung jawaban tugas dan fungsi serta hasil - hasil yang dicapai maupun permasalahan yang ada serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan selama tahun 2024.

Saran

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan program, maka diharapkan dukungan dari pihak terkait dalam penyusunan perencanaan program dan kegiatan Dinas Kesehatan kedepannya.